

**KEPENTINGAN TIONGKOK DALAM PERDAMAIAN
DI SEMENANJUNG KOREA, 2017-2018**

(Skripsi)

Oleh

Widya Michella Nur Syahida



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

KEPENTINGAN TIONGKOK DALAM PERDAMAIAN DI SEMENANJUNG KOREA, 2017-2018

Oleh

WIDYA MICHELLA NUR SYAHIDA

Penelitian ini memiliki dua tujuan yang pertama adalah untuk menganalisis kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea tahun 2017 sampai dengan 2018. Tujuan kedua adalah untuk melihat upaya perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara. Hubungan Tiongkok dengan kedua-Korea terlihat semakin intens dikarenakan adanya lawatan diplomat Tiongkok, Song Tao, ke Korea Utara untuk membahas perdamaian di Semenanjung Korea. Kemudian, kunjungan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, untuk bertemu Presiden Xi Jinping sebanyak tiga kali pada Maret, Mei, dan Juni 2018. Lalu, kunjungan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, ke Tiongkok pada Desember 2017 sebagai langkah normalisasi hubungan Korea Selatan dan Tiongkok pasca penyebaran THAAD tahun 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menggunakan yakni laporan dari NIDS, dokumen resmi, laman resmi *Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China*, *the World Bank*, CIIS, KCS, NCNK, UNSCR, dan berbagai sumber berita. Berdasarkan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dan mengacu pada konsep kepentingan nasional dan perdamaian, penulis berargumen dalam kurun waktu 2017 hingga 2018, ketiadaan perang, pembentukan kontrak, dan *limited victor peace* merupakan hal yang di dambakan oleh negara yang berada di Semenanjung Korea. Selain itu, kepentingan pertahanan, ekonomi, dan tata internasional menjadi salah satu tujuan Tiongkok untuk mengupayakan proses perdamaian di Semenanjung Korea. Di samping itu, dapat diketahui bahwa kepentingan Tiongkok di Semenanjung Korea bertujuan untuk mempertahankan atau memperluas pengaruhnya dan merusak dominasi AS di wilayah itu sebagai cara untuk mempersiapkan persaingan strategis melawan hegemoni *de facto* yang ada saat ini.

Kata Kunci: Perdamaian, Tiongkok, Semenanjung Korea

ABSTRACT

CHINA'S INTEREST IN PEACE ON THE KOREAN PENINSULA, 2017-2018

By

WIDYA MICHELLA NUR SYAHIDA

This research has two objectives, the first is to analyze China's interests in making peace on the Korean Peninsula in the year of 2017-2018. The second goal is to see peace between South Korea and North Korea on the Korean Peninsula. China's relations with two-Koreas are increasingly intense due to the visit of China's diplomat, Song Tao to North Korea for discuss peace on the Korean Peninsula. Afterwards, the visit of North Korean Leader, Kim Jong-un to meet Presiden Xi Jinping three times in March, May, and June 2018. Then, the visit of President of South Korean, Moon Jae-in to China in December 2017 as a step to normalize relations between South Korea and China after the THAAD spread in 2016. The data used in this study were reports of NIDS, official documents, official websites of Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, the World Bank, CIIS, KCS, NCNK, UNSCR, and various news sources. Based on qualitative research method using a case study approach and refered to the concepts of national interest and peace, the author argued that from 2017 to 2018, the absence of war, contract formation and limited victor peace were desirable for all countries on the Korean Peninsula. Then, the interest of defense, economic, and the international system had been one of goals to seek a peace process on the Korean Peninsula. Futhermore, it could be seen that China's interests on the Korean Peninsula had been to maintain or expand its influence and damage of US dominance in the region as a way to prepare strategic competition against the existing de facto hegemony currently.

Keywords: Peace, China, Korean Peninsula

**KEPENTINGAN TIONGKOK DALAM PERDAMAIAN
DI SEMENANJUNG KOREA, 2017-2018**

Oleh

Widya Michella Nur Syahida

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **KEPENTINGAN TIONGGOK DALAM
PERDAMAIAN DI SEMENANJUNG
KOREA, 2017-2018**

Nama Mahasiswa : **Widya Michella Nur Syahida**

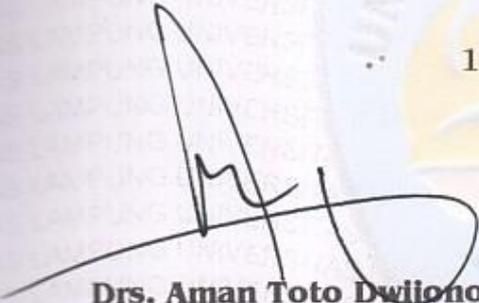
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516071051

Jurusan : Hubungan Internasional

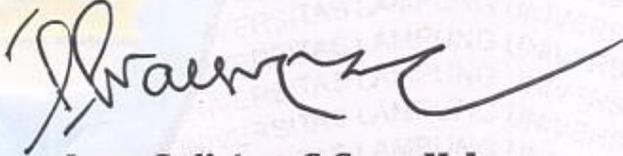
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

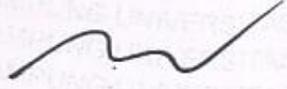


Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006



Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.
NIP 19860428 201504 1 004

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

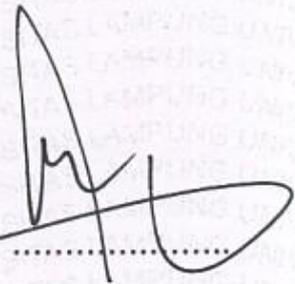


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

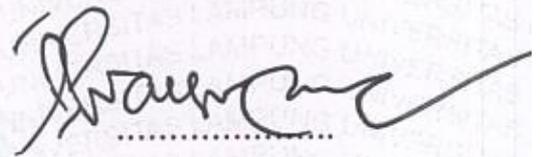
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

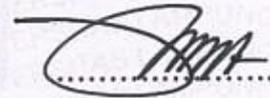
Ketua : **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**



Sekretaris : **Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**



Penguji : **Dr. Dedy Hermawan, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590603 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Mei 2019**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 Mei 2019
Yang membuat pernyataan,



Widya Michella Nur Syahida
NPM 1516071051

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Widya Michella Nur Syahida. Lahir di Bekasi, pada tanggal 09 Agustus 1997. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, buah hati Bapak Muhammad Fahrurizal Farit Ansori Najib (FAN) dan Ibu Fri Herlina.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis adalah Taman Kanak-Kanak (TK) Bhakti Pertiwi dan Sekolah Dasar Negeri Kranji 1. Setelah lulus pada 2009 penulis melanjutkan pendidikan formal di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 22 Kota Bekasi sejak tahun 2009 hingga 2012 dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Kota Bekasi yang diselesaikan pada tahun 2015.

Penulis melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di beberapa kegiatan internal dan eksternal kampus. Penulis sempat menjadi PERS HI UNILA tahun 2016-2018, Sekretaris Dinas bidang Kewirausahaan dan Pengabdian Masyarakat pada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (BEM-FISIP UNILA) tahun 2017-2018.

Penulis juga aktif dalam komunitas Jepang *Minna No Nihongo* Lampung dari tahun 2015 hingga sekarang sekaligus terlibat dalam kepanitiaan Festival Budaya Jepang (*Minna No Matsuri*) tahun 2015, pengurus Sahabat Beasiswa Chapter Lampung (SCBL) dan Pengajar Jempol Lampung dari tahun 2018 hingga sekarang. Selain itu penulis pernah menjadi wartawan magang Lampung Post selama dua bulan pada tahun 2016 dan mahasiswa magang di Direktorat Kerjasama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Ditkersin Ditjen Strahan Kemhan RI) selama dua bulan pada tahun 2019. Pada tahun 2017, penulis telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pematang Sawah, Tanggamus, Provinsi Lampung. Hingga sekarang penulis aktif menjadi wartawan *online* di Lampung dan Jakarta.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillahil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis mampu melewati berbagai proses yang ada serta dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk:

Kedua orang tuaku tercinta,

Bapak Muhammad Fahrurizal FAN dan Ibu Fri Herlina,
sebagai bukti bhakti dan tanggung jawabku sebagai seorang anak. Terima kasih sebesar-besarnya abah dan ibu, atas dukungan dan motivasinya yang selalu sabar telah menuntun anakmu sampai mendapatkan gelar sarjana dan terus menerus mengorbankan baik dalam dukungan rohani maupun batin yang tidak terhitung jumlahnya. Semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan kedua orang tuaku tercinta Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Kakak-adik yang sangat kusayang dan kucintai,

Indah Gabriella Nur Syahida dan Ayu Frihatini Gabriella Nur Syahida
Semoga ini dapat menjadi motivasi agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan tercapainya cita-cita di masa depan.

Sahabat, teman seperjuangan dan adik-adik di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikanku dukungan selama ini.

Serta Almamater yang tercinta, Universitas Lampung. Terima kasih atas berbagai pengalaman yang bermanfaat bagi kehidupanku di masa depan.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahiim, puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Kepentingan Tiongkok dalam Perdamaian di Semenanjung Korea, 2017-2018*”. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi kaumnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (FISIP Unila), penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan penelitian dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya pada ilmu hubungan internasional, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat ilmu dan kesehatan yang selalu engkau berikan kepada hambamu.
2. Abah dan Ibuku tercinta, Abah Fahrurizal FAN, S.IP., dan Ibu Fri Herlina, S.E. atas semua dukungan baik motivasi, batin, rohani, dan materi yang tidak pernah pernah berhenti untuk Michell. Terimakasih juga telah memberikan kepercayaan kepada Michell untuk dapat merantau, melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana dan menjadi anak yang

berpendidikan, yang selalu mengajarkan anak-anaknya untuk lebih mandiri dan dapat bersaing dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, atas dukungan dan motivasimu, Michell dapat berada sampai sejauh ini. Semoga Abah dan Ibu selalu berada di dalam perlindungan Allah SWT. Michell selalu mendoakanmu disetiap nafas dan pikiran Michell bah, bu, dan juga Michell akan selalu berusaha meningkatkan kualitas diri agar dapat mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Aamiin Ya Rabbal Alamin.....

3. Kakak dan Adikku yang sangat kusayang dan kucintai, Indah Gabriella Nur Syahida dan Ayu Frihatini Gabriella Nur Syahida. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya yang memberikanku kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun kita di batasi oleh jarak dan waktu akan tetapi koordinasi kita tetap akan bersatu selamanya sampai akhir hayat kita nanti. Semoga Allah selalu memberikan kita semua jalan demi mengejar cita-cita di masa depan. Aamiin Ya Rabbal Alamin....
4. Ibu Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing Akademik saya, terimakasih Mbak Gita atas segala dukungan dan arahan mbak yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan yang telah mbak gita berikan kepada saya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.....
5. Ibu Dwi Handayani, S.IP., M.Si., selaku Dosen Jurusan Hubungan Internasional, terimakasih Ibu Dwi atas segala pelajaran berharga yang telah saya dapatkan selama ini. Semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan Ibu Dwi. Aamiin Ya Rabbal Alamin.....

6. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan Pembimbing Utama Skripsi yang telah membimbing, memberikan saran dan kritik serta motivasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Iwan Sulistyio, S.Sos., M.A, selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih mas, atas saran dan masukannya selama ini. Semoga Mas Tyo mendapatkan pahala berlipat ganda dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Sukses selalu Mas Tyo, Aamiin Ya Rabbal Alamin.....
9. Bapak Dedy Hermawan S.Sos., M.Si, selaku dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada seluruh jajaran dosen FISIP Universitas Lampung terutama pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
11. Teruntuk sahabat terkasih dan tercintaku, An Nisaa Atila Thabrani dan Atika Oktaria Sari Nilam, terimakasih telah menjadi keluargaku di Provinsi Lampung yang selalu ada dari awal hingga akhir untuk memotivasi, mendukung dalam keadaan apapun baik suka, duka maupun tawa dan memberikan kritik serta saran guna membangun. Semoga kita selalu bersama di masa depan Aamiin ya rabbal alamin.....

12. Terimakasih kepada sahabat seperjuanganku selama di perkuliahan terutama kelompok belajar *Outline Semangat* yaitu: Shintia Erleni, Mega Ulfa, Donna Charinda Exsanti, Devita Riana Purba, Ismi Wardatun, Riris Silalahi, Intan Nata Sasmita. Terima Kasih untuk semua pengalaman berharga, kebahagiaan, kesedihan yang telah dilalui bersama dan saya dapatkan di bangku perkuliahan. Teman sepermainan: Yunda Yulianti dan Nabiila Nuri Solekhah. Semoga kalian tetap menjadi sahabat dan keluarga di masa depan Aamiin Ya Rabbal Alamin.....
13. Terimakasih kepada komunitas *Minna No Nihon Go* Lampung, yaitu: Dewi Sensei, Hideo Sensei, Birsye Senpai, Yuli Senpai, Amanda Senpai, Adit Senpai, Andria Senpai, Harry Senpai, Arif Senpai, Nopal Kouhai, Farrel Kouhai yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama ini.
14. Terimakasih untuk HI angkatan 2015 dan seluruh keluarga HI FISIP Unila, terimakasih sudah memberikan berbagai pengalaman selama di bangku perkuliahan.
15. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dan memberikan perhatian dalam bentuk apapun dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan yang telah kalian lakukan. Aamiin Ya Rabbal Alamin....

Bandar Lampung, 23 Mei 2019

Penulis,

Widya Michella Nur Syahida

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS Al-Baqarah : 286)

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan” (QS Al-Mujadilah : 11)

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kerangka Analitis	16
2.2.1 Kepentingan Nasional	17
2.2.2 Perdamaian	20
2.3 Kerangka Pikir	23
III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Jenis dan Sumber Data	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Level dan Unit Analisis	27
3.6 Validitas Data	29

3.7 Teknik Analisis Data.....	29
IV. GAMBARAN UMUM	30
4.1 Gambaran Umum Tiongkok	30
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	38
5.1 Perdamaian di Semenanjung Korea Tahun 2017-2018.....	38
5.1.1 Ketiadaan Perang	39
5.1.2 Pembentukan Kontrak.....	42
5.1.3 <i>Limited Victor Peace</i>	45
5.2 Kepentingan Tiongkok dalam Perdamaian di Semenanjung Korea Tahun 2017-2018	54
5.2.1 Kepentingan Tiongkok di Bidang Pertahanan	54
5.2.1.1 Kepentingan Tiongkok di Korea Utara.....	55
5.2.1.2 Kepentingan Tiongkok di Korea Selatan	61
5.2.2 Kepentingan Tiongkok di Bidang Ekonomi	70
5.2.2.1 Hubungan Tiongkok dan Korea Utara	71
5.2.2.2 Hubungan Tiongkok dan Korea Selatan	75
5.2.3 Kepentingan Tiongkok di Bidang Tata Internasional	80
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	88
6.1 Simpulan	88
6.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	24
Gambar 5.1 Perdagangan Korut- Tiongkok.....	71
Gambar 5.2 Total Impor dan Ekspor Korut- Tiongkok.....	73
Gambar 5.3 Perdagangan Korsel - Tiongkok	76

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Tabel Hubungan Tiongkok dengan Korut dan Korsel.....	6
Tabel 2.1	Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1	Tabel Tingkat Analisis Penelitian.....	28

DAFTAR SINGKATAN

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
AIIB	: <i>Asian Infrastructure Investment Bank</i>
APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
ARF	: <i>ASEAN Regional Forum</i>
AS	: <i>Amerika Serikat</i>
ASBM	: <i>A highly maneuverable anti-ship ballistic missile</i>
BRI	: <i>Belt and Road initiative</i>
BRF	: <i>Belt and Road Forum</i>
BRICS	: <i>Brazil, Russia, India, China and South Africa</i>
CCETCF	: <i>China–Caribbean Economy and Trade Cooperation Forum</i>
CCTV	: <i>Closed Circuit Television</i>
CEE	: <i>Central and Eastern Europe</i>
CIIS	: <i>China Institute for International Strategic Studies</i>
CISS	: <i>Center for International & Strategic Studies</i>
CPC	: <i>Communist Party of China</i>
CRF	: <i>Council on Foreign Relations</i>
CWC	: <i>Chemical Weapons Convention</i>
DK PBB	: <i>Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa</i>
FTB	: <i>Foreign Trade Bank</i>
G20	: <i>Group of Twenty</i>
IAEA	: <i>International Atomic Energy Agency</i>
ICBM	: <i>Intercontinental Ballistic Missile</i>
Interpol	: <i>International Criminal Police Organization</i>
JV	: <i>Joint Venture</i>

KCS	: <i>Korea Custom Services</i>
KOTRA	: <i>The Korea Trade-Investment Promotion Agency</i>
KTT	: <i>Komisi Tingkat Tinggi</i>
MIA	: <i>Missing in Action</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NCNK	: <i>The National Commitee on North Korea</i>
NIDS	: <i>The National Institute for Defense Studies</i>
NPT	: <i>Non-proliferation of Nuclear Treaty</i>
OBOR	: <i>One Belt, One Road</i>
PDB	: <i>Produk Domestik Bruto</i>
PLA	: <i>People's Liberation Army</i>
POW	: <i>Prisoners of War</i>
PRC	: <i>People's Republic of China</i>
ROK	: <i>Republic of Korea</i>
RCEP	: <i>The Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
RSIS	: <i>Rajaratnam School of International Studies</i>
SCO	: <i>Shanghai Cooperation Organization</i>
SLBM	: <i>Submarine-Launched Ballistic Missiles</i>
SPT	: <i>Six Party Talks</i>
THAAD	: <i>Terminal High Altitude Area Defense</i>
TPP	: <i>Trans Pacific Partnership</i>
UE	: <i>Uni Eropa</i>
UNSCR	: <i>United Nations Security Council Resolution</i>
WEF	: <i>World Economic Forum</i>
WMD	: <i>Weapons Mass Destruction</i>
ZEE	: <i>Zona Ekonomi Eksklusif</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdamaian didefinisikan oleh Webster sebagai suatu kondisi adanya kesesuaian dengan pemerintah yang dibuktikan dengan ketiadaan permusuhan atau perang.¹ Perdamaian juga dapat diartikan sebagai ketiadaan konflik dan kekerasan seperti perang atau ancamannya. Definisi perdamaian sendiri dapat dilihat menjadi dua bentuk, yaitu perdamaian positif dan perdamaian negatif. Perdamaian positif adalah suatu kondisi sosial tidak adanya eksploitasi secara nyata atau kekerasan struktural, sedangkan perdamaian negatif adalah suatu kondisi ketiadaan perang secara langsung.² Jadi, dapat diartikan bahwa perdamaian akan terwujud apabila negara tidak merasa memiliki ancaman, baik di dalam lingkup internasional maupun kawasan regional.

Pada kenyataannya, perdamaian menjadi sebuah khayalan bagi kawasan Asia Timur yang ditandai dengan adanya perubahan dinamika politik, keamanan, ekonomi, dan *balance of power* meliputi konflik sengketa perbatasan, modernisasi persenjataan dengan kepemilikan senjata nuklir di beberapa negara dalam rangka

¹ Johan Galtung dan Charles Webel (2007). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. London and New York: Routledge. Hal 6

² Diez Thomas, Bode Ingvild dan Aleksandra Fernandes da Costa (2011). *Key Concepts in International Relations*. New Yorks: SAGE Publications. Hal 154-155

peningkatan kapabilitas militer khususnya permasalahan krisis di Semenanjung Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel). Adanya instabilitas di Semenanjung Korea merupakan bentuk dari berakhirnya Perang Dingin yaitu kedua negara terpisah pada garis 38 derajat, yaitu Korut bersama Uni Soviet dengan ideologi komunismenya, disatu pihak dan Korsel bersama Amerika Serikat (AS) dengan ideologi liberalisme, di pihak lain.

Kemudian kedua negara kembali bersitegang akibat terjadinya Perang Korea pada tahun 1950-1953, lalu berakhir dengan perjanjian gencatan senjata dan zona bebas militer. Hal tersebut menjadi salah satu alasan sulitnya mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea seperti adanya tindakan negara-negara di kawasan Asia Timur yang terus meningkatkan postur kekuatan militernya. Dengan kata lain, negara-negara kawasan Asia Timur tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dilema keamanan. Peningkatan anggaran persenjataan suatu negara di kawasan selalu dapat dilihat dan dimaknai sebagai sebuah ancaman keamanan bagi negara lain, begitu pula sebaliknya.

Adanya peningkatan kekuatan pertahanan yang dijalankan oleh satu negara ditujukan untuk memperlemah pertahanan negara lain, sehingga memicu kekhawatiran dan sikap saling curiga satu sama lain. Kecurigaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik dalam skala besar. Dalam konteks Asia Timur, kebijakan Tiongkok, Jepang, dan Korsel meningkatkan anggaran belanja militer membuat Korut khawatir sehingga berupaya untuk memperkuat kekuatan kapabilitas militernya dengan senjata nuklir dan peluru kendali.³

³ M. Najeri Al, Syahrin (2018). *Logika Dilema Keamanan Asia Timur dan Rasionalitas Pengembangan Senjata Nuklir Korut*. *Intermestic: Journal of International Studies*. Volume 2, No. 2, 116-138.

Kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang terkenal dengan tingginya pola permusuhan (*enmity*) antarnegara. Pola ini berasal dari konsep *security complex* yang diformulasikan oleh Barry Buzan seorang pemikir terkemuka dalam kajian keamanan internasional dan pengkajian strategis. Pola *enmity* sendiri digambarkan oleh Buzan sebagai suatu hubungan antarnegara yang terjalin atas dasar kecurigaan (*suspicion*) dan rasa takut (*fear*) satu sama lain yang dilihat dari sengketa perbatasan, kepentingan yang berkaitan dengan etnis tertentu, ideologi serta latar belakang historis.⁴

Oleh karena itu, guna mengurangi pola *enmity* tersebut negara-negara di kawasan Asia Timur berupaya untuk menciptakan sebuah pembicaraan demi menjaga stabilitas dan keamanan, khususnya mendorong perdamaian di Semenanjung Korea, yaitu dengan cara menggelar suatu pembicaraan enam pihak yang dikenal *Six Party Talks* (SPT). Pembicaraan ini dimulai pada tahun 2003 beranggotakan enam negara, yaitu AS, Rusia, Tiongkok, Jepang, Korsel, dan Korut. Pembicaraan ini seringkali juga menghasilkan beberapa perjanjian mengikat mengenai penurunan senjata nuklir di Korut. SPT juga hadir sebagai respon terhadap keluarnya Korut dari perjanjian *Non-Proliferation of Nuclear Treaty* (NPT).⁵

Salah satu negara pelopor SPT sekaligus *rising power* di kawasan Asia Timur, yakni Tiongkok, turut mewujudkan denuklirisasi, normalisasi hubungan antarnegara dan membangun mekanisme keamanan di kawasan Asia Timur secara

⁴ Barry Buzan dan Weiver Ole. (2003). *Region and Power : The Structure in International Security*. Cambridge: Cambridge University Press. Hal 7

⁵ IONP. (2011). *International Nonproliferation Organizations and Regimes Center for Nonproliferation Studies*. Diambil kembali dari Six Party Talks-Nuclear Threat Initiative: <http://www.nti.or>

konsisten. Tiongkok bersikeras bahwa masalah ini harus diselesaikan melalui dialog dan konsultasi antarnegara. Bahkan, Beijing juga mendorong peningkatan hubungan antara Korsel dan Korut dalam rangka mewujudkan rekonsiliasi dan kerja sama agar tercapainya penyatuan yang independen dan damai.⁶ Hal ini karena Tiongkok merupakan mitra dagang utama Korut baik dalam bantuan kemanusiaan maupun energi. Begitupula dengan Korsel yang merupakan pasar bisnis ekonomi Tiongkok. Selain itu, Tiongkok turut memainkan peran penting dalam bertindak sebagai mediator untuk SPT disamping adanya ketertarikan Tiongkok untuk menjaga stabilitas di Korut. Beijing juga khawatir akan menjadi tempat tujuan penerimaan pengungsi Korut ketika menegangnya ekshalasi konflik dengan Korsel.

Hal yang menarik terjadi pada periode tahun 2017 hingga 2018, yaitu November 2017 adanya upaya Tiongkok untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea dengan mengirimkan diplomat terbaiknya, Song Tao guna bertemu dengan pejabat Korut. Kemudian setelah bertahun-tahun hubungan kedua negara bersitegang akibat uji coba nuklir dan rudal Korut, kini hubungan dua negara korea semakin menghangat karena adanya kunjungan Pemimpin Korut, Kim Jong-un, untuk bertemu Presiden Tiongkok, Xi Jinping, sebanyak tiga kali pada bulan Maret, Mei, dan Juni 2018.

Kunjungan itu memungkinkan bagi Kim Jong-un untuk mendapatkan jaminan dari Tiongkok bahwa Pemerintah Tiongkok akan mendukung Korut jika pertemuan Kim dan Presiden AS, Donald Trump, gagal mencapai kesepakatan. Kunjungan tersebut menjadi peringatan bagi Trump bahwa Tiongkok memiliki

⁶ IONP.,*op.cit.*

posisi vital dan peranan penting sebagai pemain sentral dalam krisis nuklir Semenanjung Korea.⁷

Kunjungan Korut ke Tiongkok tersebut tidak lain untuk menurunkan ketegangan di Semenanjung Korea terutama ketika runtuhnya rezim Korut yang mengancam Beijing. Bagi Tiongkok, runtuhnya rezim politis di Korut akan meningkatkan jumlah pengungsi karena kondisi teritorial yang berbatasan secara langsung dengan Korut membuat Tiongkok lebih berhati-hati dalam upaya mendukung reunifikasi kedua-Korea. Kemudian dari sisi kepentingan keamanan, runtuhnya Korut juga dapat menjadikan kepentingan strategis AS untuk mengawasi Tiongkok di Asia Timur.⁸

Selanjutnya, pada Desember 2017, adanya kunjungan Presiden Korsel, Moon Jae-in ke Tiongkok, dimana kedua negara berkomitmen untuk kembali mengamankan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea melalui kesepakatan empat prinsip, yaitu: tidak ditoleransinya perang di Semenanjung Korea, pemeliharaan prinsip denuklirisasi Semenanjung Korea, permasalahan akan diselesaikan secara damai melalui dialog, dan peningkatan hubungan antar-Korea dalam rangka menyelesaikan masalah yang melibatkan Semenanjung Korea.⁹ Berikut tabel dinamika hubungan Tiongkok dengan Korut dan Korsel:

⁷ Johnson, J., & Kikuchi, D. (2018). *With Historic Meeting of Leaders, North Korea and China Shore Up Leverage as Kim-Trump Talks Loom*. Diambil kembali dari The Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/28/asia-pacific/historic-meeting-leaders-north-korea-china-shore-leverage-kim-trump-talks-loom/#.WwYdeTjLJqx>

⁸ Yea, S. (2017). *Demystifying the Survival of North Korea*. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 4(1). <https://doi.org/10.1177/2347797016689208>, 50–68.

⁹ Kristian McGuire. (2018). *China-South Korea Relations: A Delicate Detente*. Diambil kembali dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2018/02/China-south-korea-relations-a-delicate-detente/>

Tabel 1.1 Hubungan Tiongkok dengan Korut dan Korsel.

Negara	Waktu	Agenda Pertemuan
Tiongkok dan Korut	November 2017	Presiden Tiongkok Xi Jinping mengirim seorang utusan khusus, yakni Song Tao, untuk bertemu dengan pejabat Korut.
	25-28 Maret 2018	Kunjungan pertama Kim Jong-un ke Beijing. Pertemuan menghasilkan persahabatan Korut-Tiongkok serta memfasilitasi perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.
	08 Mei 2018	Kunjungan kedua Kim Jong-un ke Tiongkok. Kunjungan ini dilakukan di tengah perbaikan keadaan di semenanjung, usai pertemuan bersejarah Kim dengan Presiden Korsel Moon Jae-in pada 27 April 2018, serta mendukung pergeseran strategis Korut ke arah pertumbuhan ekonomi.
	19 Juni 2018	Kunjungan ketiga Kim Jong-un ke Tiongkok. Kunjungan ini dilakukan untuk melaporkan hasil pertemuan Kim Jong Un dengan Presiden AS, Donald Trump pada 12 Juni 2018 dan pemberian ucapan terima kasih atas peran diplomatik Tiongkok, sehingga pertemuan bersejarah tersebut dapat terwujud.
	20 Juni 2018	Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden Tiongkok Xi Jinping sepakat memperkuat kerja sama "strategis dan taktis" antara kedua negara dalam pertemuan bilateral di Beijing.
	10 September 2018	Tiongkok menghadiri peringatan 70 tahun pendirian Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK).
Tiongkok dan Korsel	7 Juli 2016	Keputusan Korsel untuk menyebarkan sistem pertahanan rudal AS atau <i>Terminal High Altitude Area Defense</i> ¹⁰ (THAAD) mengancam keamanan Tiongkok.
	Desember 2016	Terhadap penyebaran THAAD oleh Korsel. Tiongkok merespon dengan melakukan tekanan ekonomi berupa sanksi tidak resmi terutama pada industri pariwisata dan hiburan lalu menghambat kegiatan perusahaan Korsel di Tiongkok; memberlakukan pajak tambahan, inspeksi dan boikot.
	13-16 Desember 2017	Kunjungan Moon Jae-in ke Tiongkok untuk mengembalikan hubungan mereka pada jalur positif dalam rangka mengamankan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.

Sumber: CNN (2016; 2017; 2018)

Tabel 1.1 di atas memperlihatkan bahwa, pada tahun 2017 hingga 2018, terdapat intensitas pertemuan Tiongkok dengan kedua-Korea, yaitu Korut dan Korsel. Tentu dibutuhkan konsistensi bagi Tiongkok dalam upaya negosiasi dan

¹⁰ THAAD merupakan sistem yang berguna untuk mencegah dan menghancurkan target rudal balistik yang masuk baik di dalam maupun di luar atmosfer bumi pada jarak 200 kilometer. Selain itu THAAD dapat mengurangi efek senjata pemusnah masal sebelum mereka mendarat di permukaan tanah. Lihat selengkapnya di *US Department of Defence, Missile Defence Agency* diambil kembali dari <http://www.mda.mil/system/thaad.html>

mediasi kedua negara untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, didapatkan suatu pemahaman bahwasanya permasalahan di Semenanjung Korea merupakan dampak dari Perang Dingin dan periode setelahnya. Dengan terbaginya Semenanjung Korea menjadi dua bagian, perbedaan ideologi dan hingga kini masih berada dalam kondisi gencatan senjata tentu berpotensi mengancam perdamaian dunia dan stabilitas regional negara-negara khususnya negara di kawasan Asia Timur terutama di Semenanjung Korea. Negara-negara di kawasan Asia Timur pun turut melakukan berbagai upaya guna menciptakan perdamaian dan stabilitas kawasan, salah satunya adalah Tiongkok. Sebagai *rising power* di kawasan Asia Timur, penulis melihat bahwa Tiongkok dapat memainkan peranan penting sekaligus menjalankan kepentingan nasionalnya di Semenanjung Korea. Oleh karena itu, penulis merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu **“Apa kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea dari tahun 2017 hingga 2018?”**¹¹

¹¹ Pada penelitian ini, penulis memilih interval waktu November 2017 hingga Desember 2018. Atas dasar beberapa pertimbangan. *Pertama*, belum adanya penelitian yang secara khusus menjelaskan pencapaian Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea pada 2017-2018. *Kedua*, karena lawatan diplomat Tiongkok, Song Tao, ke Korut untuk membahas perdamaian di Semenanjung Korea. Lalu *Ketiga*, adanya kunjungan pemimpin Korut, Kim Jong-un, untuk bertemu Presiden Xi Jinping sebanyak tiga kali pada Maret, Mei, dan Juni 2018. *Keempat*, adanya kunjungan Presiden Korsel, Moon Jae-in, ke Tiongkok pada Desember 2017 sebagai langkah normalisasi hubungan Korsel dan Tiongkok pasca penyebaran THAAD tahun 2016.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis menetapkan dua tujuan penulisan, yakni:

1. Menjelaskan perdamaian di Semenanjung Korea selama periode 2017-2018; dan
2. Menganalisis kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea dalam kurun waktu 2017-2018.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan keilmuan dan kegunaan praktis.

Kegunaan Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi kalangan penstudi ilmu hubungan internasional dan semua kalangan secara umum mengenai Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea, dalam fokus kajian keamanan internasional sekaligus mengembangkan teori-teori Hubungan Internasional, terutama di kawasan Asia Timur. Juga, untuk menggambarkan kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea.

Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan dalam menggambarkan dan melihat perkembangan kepentingan Tiongkok guna perdamaian di Semenanjung Korea serta mampu memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan untuk upaya perdamaian di Semenanjung Korea.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sampai saat ini penelitian yang spesifik terkait upaya Tiongkok untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea sudah banyak ditemukan oleh penulis. Namun, penelitian terdahulu yang memiliki judul serupa mengenai kepentingan Tiongkok dalam mencapai perdamaian di Semenanjung Korea periode 2017-2018 belum ditemukan oleh penulis. Untuk mendukung kerangka analitis yang akan digunakan, penulis berupaya mereviu (lima) penelitian terdahulu mengenai kepentingan Tiongkok :

Pertama, sebuah jurnal yang ditulis oleh Feng Zhu, seorang profesor pada *University's School of International Studies* sekaligus wakil direktur *Center for International & Strategic Studies (CISS)*, yang berjudul *Flawed Mediation and a Compelling Mission: Chinese Diplomacy in the Six-Party Talks to Denuclearise North Korea*. Feng Zhu menceritakan kegagalan Tiongkok dalam memainkan peran mediator yang dibuktikan oleh insiden Cheonan, Yeonpyeong, dan pabrik pengayaan uranium yang baru diperkenalkan di Yeonbyon. Faktor analisis lainnya menurut Zhu yaitu mengungkapkan kompleksitas masalah Korut yang dapat memicu perlombaan senjata nuklir, menghambat perkembangan ekonomi regional

dan bahkan menciptakan perpecahan geopolitik¹² di Asia Timur. Analisis Feng Zhu menekankan ketidaktegasan Tiongkok terhadap Korut. Namun disisi lain, Tiongkok hanya mengutamakan kepentingan keamanannya sendiri.¹³

Perbedaan skripsi yang ditulis dengan penelitian Feng Zhu ialah terlihat pada fokus penelitian. Fokus penelitian Feng Zhu adalah kegagalan Tiongkok dalam pembicaraan enam negara sedangkan fokus skripsi ini adalah pada dinamika kepentingan Tiongkok dalam mencapai proses perdamaian di Semenanjung Korea.

Kedua, jurnal berjudul *Testing the Rhetoric of China's Soft Power Campaign: a Case Analysis of Its Strategic Ambiguity in the SPT over North Korea's Nuclear Program* yang ditulis oleh Juyan Zhang, (seorang cendekiawan yang berkontribusi pada *University of Southern California's Center*) dan Yi Han, (asisten profesor bidang organisasi dan manajemen pada *Guanghua School of Management, Peking University*). Dalam tulisan ini, mereka mengamati Tiongkok dengan konsep *soft power* yang dikemukakan oleh Joseph Nye bahwa Tiongkok menggunakan kecerdasan emosional/kemampuan untuk mengendalikan emosi, menjangkau negara lain, menyusun visi masa depan, dan keterampilan komunikasi verbal maupun non verbal.

Penelitian ini menguji aspek komunikasi organisasi dan ambiguitas strategis untuk melihat bagaimana gaya Pemerintah Tiongkok dalam meningkatkan perannya di Asia Timur. Menurutnya, Tiongkok menggunakan SPT sebagai sarana

¹² Geopolitik, istilah yang diciptakan oleh Rudolf Kjellen pada tahun 1899. Geopolitik merupakan sebuah posisi politik negara di dunia berdasarkan konteks geografis yang menganalisis ruang, lokasi, ukuran, dan sumber daya negara bangsa. Hal ini dikarenakan masing-masing negara tidak memiliki karakteristik geografis dan lingkungan yang serupa sehingga negara-negara harus mengembangkan geopolitiknya berdasarkan pengetahuan dan kondisi politik. Lihat selengkapnya di *Chapter 2: Changing Concept Of Geopolitics in Course of Time*, hal 46 diakses melalui http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/18345/9/09_chapter%202.pdf

¹³ Feng Zhu. (2011). Flawed Mediation and a Compelling Mission: Chinese Diplomacy in the Six-Party Talks to Denuclearise North Korea. *East Asia Journal Volume 28 issue 3*, 205.

untuk memamerkan *soft diplomacy* yang berakibat pada keambiguan peran Tiongkok dalam mendefinisikan format dan proses pembicaraan SPT.

Ambiguitas peran Tiongkok dapat dilihat ketika Tiongkok menjadi negara adidaya yang tidak dapat menggunakan tindakan tegas kepada Korut atau tidak berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi Korut. Pada saat yang sama, kedua negara terus bekerja sama dan berkoordinasi dalam kerangka multilateral dari pembicaraan enam pihak.¹⁴

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu terletak pada konsep. Jika fokus penelitian Juyan Zhang dan Yi Han berada pada diplomasi Tiongkok dengan memanfaatkan konsep *soft power*, skripsi ini memberi penekanan pada kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea menggunakan konsep kepentingan nasional dan perdamaian.

Ketiga, tulisan berjudul *China and Northeast Asia's Regional Security Architecture: The Six-Party Talks as a Case of Chinese Regime-Building?* yang ditulis oleh Ramon Pacheco Pardo, dosen senior hubungan internasional pada *King's College London* sekaligus dewan editorial pengamat Uni Eropa-Tiongkok dan *Global Studies Journal* menunjukkan bagaimana Tiongkok bekerja untuk membangun arsitektur keamanan regional baru di Asia Timur Laut dan menjelaskan mengapa para pemimpin Tiongkok berusaha untuk menciptakan tatanan semacam itu.

Penelitian Ramon Pacheco Pardo sangat spesifik menjelaskan peran Tiongkok dalam membangun arsitektur keamanan regional baru yang lebih luas dan

¹⁴ Juyan Zhang dan Yi Han. (2013). Testing the rhetoric of China's soft power campaign: a case analysis of its strategic ambiguity in the Six Party Talks over North Korea's nuclear program. *Asian Journal of Communication*, 23:2, 203.

terlembaga serta melihat perilaku Tiongkok dalam pembicaraan enam pihak dalam menangani krisis nuklir Korut. Selama periode ini, para pembuat kebijakan Tiongkok beralih dari sikap pasif menjadi kepemimpinan aktif dari ketegasan menjadi kerja sama dan dari unilateralisme ke multilateralisme.¹⁵

Oleh karena itu, skripsi yang ditulis ini justru merupakan penelitian yang lebih umum, yakni kepentingan Tiongkok dalam mencapai perdamaian di Semenanjung Korea dengan memanfaatkan kerangka analitis kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan tata internasional serta indikator konsep perdamaian yang diperoleh dari para pemikir perdamaian, yakni kondisi ketiadaan perang, pembentukan kontrak, dan *limited victor's peace*.

Keempat, Scobell Andrew, seorang ilmuwan politik senior pada *the RAND Corporation* dan Cozad Mark, seorang analis riset pertahanan pada lembaga yang sama, menulis sebuah artikel jurnal yang berjudul *China's North Korea Policy: Rethink or Recharge?* mereka memaparkan, perlu adanya pengkajian ulang kebijakan luar negeri Tiongkok dalam melihat perilaku Korut, yakni ketika tidak adanya pemberitahuan aksi-aksi termasuk serangkaian uji coba rudal dan nuklir Korut dengan Beijing. Mereka melihat tidak adanya pengkajian ulang kebijakan Tiongkok yang serius terhadap situasi Pyongyang pada tahun 2000an. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan Tiongkok dalam menyoroti sumber daya alam milik Korut yang nantinya akan dialokasikan kepada para pemimpin Tiongkok.¹⁶

¹⁵ Ramon Pacheco Pardo. (2012). China and Northeast Asia's Regional Security Architecture: The Six-Party Talks as a Case of Chinese Regime-Building?. *Journal of East Asia* (2012) 29:337–354 DOI 10.1007/s12140-012-9181-4, 345.

¹⁶ Scobell Andrew dan Cozad Mark. (2014). China's North Korea Policy: Rethink or Recharge? Challenges for pasific command, *Parameter* 44 (1) *Spring* 2014, 51-63.

Kedua peneliti tersebut juga melihat adanya upaya Tiongkok dalam mengejar kebijakan perdamaian, stabilitas, dan denuklirisasi. Bahkan juru bicara Departemen Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei, mengatakan bahwa Tiongkok tetap fokus pada menjaga perdamaian dan stabilitas di semenanjung dan Tiongkok mendorong proses denuklirisasi. Pada kenyataannya denuklirisasi merupakan prioritas yang jauh lebih rendah daripada menjaga perdamaian dan stabilitas bagi Tiongkok.¹⁷

Adapun perbedaan skripsi penulis dengan penelitian yang disebut terakhir ialah pada periode waktu yang diambil. Scobell Andrew dan Cozad Mark menggunakan interval waktu dari tahun 2000 sampai 2014 sedangkan penulis skripsi ini menggunakan interval waktu dari tahun 2017 hingga 2018 yaitu upaya Tiongkok untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di semenanjung serta mendorong proses denuklirisasi telah berhasil dibuktikan dengan adanya Deklarasi Panmunjom yang ditandatangani oleh pemimpin kedua negara, Korut dan Korsel pada 27 April 2018. Hal ini merupakan peristiwa bersejarah dalam upaya perdamaian di Semenanjung Korea.

Kelima, penelitian dengan tema yang sama ditulis oleh Nur Afyah Isnaeni, seorang mahasiswa Hubungan Internasional pada Universitas Diponegoro, Semarang berjudul *Dampak Program Pengembangan Nuklir Korut terhadap Hubungan Bilateralnya dengan Tiongkok tahun 2013-2015*. Isnaeni menjelaskan bahwa adanya perubahan sikap Tiongkok terkait uji coba nuklir Korut yang signifikan disebabkan oleh kondisi dunia internasional dan adanya perubahan dalam kondisi domestik Tiongkok. Kondisi dunia internasional yang mendesak

¹⁷ Scobell Andrew dan Cozad Mark. *op. cit.*, hal 54.

Tiongkok berasal dari negara-negara *super power* seperti AS yang menyerukan Tiongkok segera mengambil langkah tegas terhadap sekutunya, Korut.¹⁸

Penelitian ini juga melihat dampak buruk hubungan bilateral Korut-Tiongkok, yaitu Tiongkok tidak lagi memberikan dukungan diplomatis kepada Korut pada Resolusi 2094¹⁹ yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sebagai akibat dari uji coba nuklir Korut yang ketiga. Penelitian ini juga menekankan pada beberapa perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap nuklir Korut yang dipengaruhi oleh status Tiongkok sebagai sekutu terdekat Korut yang dinilai memiliki pengaruh unik terhadap rezim politik di Korut.²⁰

Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada objek penelitian. Penelitian Isnaeni melihat pergeseran kebijakan luar negeri Tiongkok sebagai respon uji coba nuklir Korut sedangkan penelitian penulis pada skripsi ini melihat kebijakan luar negeri Tiongkok hanya dalam cakupan kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Adapun ringkasan terhadap kelima penelitian terkait kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁸ Nur Afyah Isnaeni (2017). Dampak Program Pengembangan Nuklir Korut terhadap Hubungan Bilateralnya dengan Tiongkok tahun 2013-2015. *Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2017*, Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/in>. Hal 48.

¹⁹ Resolusi ini menghentikan transfer uang dan menutup Pyongyang dari sistem keuangan internasional. Pemberian sanksi dilakukan setelah uji coba ketiga nuklir Korut.

²⁰ Nur Afyah Isnaeni, *op.cit.*, hal 54.

Tabel 2.1 Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Fokus Tulisan	Jalan Keluar
1.	Feng Zhu, (2011)	<i>Flawed Mediation and a Compelling Mission: Chinese Diplomacy in the Six-Party Talks to Denuclearise North Korea</i>	Kegagalan diplomasi Tiongkok dalam SPT. Adanya ketidaktegasan Tiongkok dalam menangani permasalahan nuklir di Korut, Tiongkok lebih mengutamakan kepentingan keamanannya sendiri.	Redefinisi diplomasi Tiongkok
Perbedaan dengan penelitian terdahulu		Skripsi ini menekankan pada dinamika kepentingan Tiongkok dalam mencapai proses perdamaian Semenanjung Korea.		
2.	Juyan Zhang & Yi Han (2012)	<i>Testing The Rhetoric of China's Soft Power Campaign: A Case Analysis of Its Strategic Ambiguity in the SPT Over North Korea's Nuclear Program</i>	Penelitian ini, menguji aspek komunikasi organisasi dan ambiguitas strategis pemerintah Tiongkok di kawasan Asia Timur. Menurutnya, Tiongkok menggunakan SPT sebagai sarana untuk memamerkan <i>soft diplomacy</i> yang berakibat pada keambiguan peran Tiongkok dalam mendefinisikan format dan proses SPT.	Redefinisi konsep <i>soft power</i> Tiongkok
Perbedaan dengan penelitian terdahulu		Yakni pada konsep penelitian. Penulis, melihat kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea menggunakan konsep kepentingan nasional dan perdamaian.		
3.	Ramon Pacheco Pardo (2012)	<i>China and Northeast Asia's Regional Security Architecture: The Six-Party Talks as a Case of Chinese Regime-Building?</i>	Penelitian ini berfokus pada bagaimana kepemimpinan Beijing dapat membentuk rezim keamanan baru di kawasan Asia Timur yang lebih luas dan terlembaga.	Tiongkok menjadi lebih aktif berubah dari unilateralisme ke multilateralisme.
Perbedaan dengan penelitian terdahulu		Skripsi penulis akan menjadi penelitian yang lebih umum: kepentingan Tiongkok dalam mencapai perdamaian di Semenanjung Korea berdasarkan kerangka analitis yang digunakan yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan tata internasional serta indikator konsep perdamaian yang diperoleh dari para pemikir perdamaian yakni ketiadaan perang, pembentukan kontrak, dan <i>limited victor peace</i> .		
4.	Scobell Andrew & Cozad Mark (2014)	<i>China's North Korea Policy: Rethink or Recharge?</i>	Memaparkan adanya pengkajian ulang terhadap kebijakan luar negeri Tiongkok. Mereka melihat tidak adanya pengkajian ulang kebijakan Tiongkok yang serius terhadap situasi Pyongyang pada tahun 2000an. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan Tiongkok dalam menyoroti sumber daya alam Korut yang nantinya akan dialokasikan kepada para pemimpin Tiongkok.	Pengkajian ulang kembali kebijakan luar negeri Tiongkok menjadi netral dan tidak berpihak.
Perbedaan dengan penelitian terdahulu		Yaitu pada periode waktu yang diambil Scobell Andrew dan Cozad Mark yang menggunakan interval waktu tahun 2000 sampai dengan 2014 sedangkan skripsi ini menggunakan interval waktu tahun 2017-2018.		

5.	Nur Afyah (2017)	<i>Dampak Program Pengembangan Nuklir Korut terhadap Hubungan Bilateralnya Dengan Tiongkok Tahun 2013-2015</i>	Menekankan pada beberapa perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap nuklir Korut yang dipengaruhi oleh status Tiongkok sebagai sekutu terdekat Korut yang dinilai memiliki pengaruh unik terhadap rezim politis di Korut.	Tiongkok tidak lagi memberikan dukungan diplomatis kepada Korut pada Resolusi 2094 yang dijatuhkan oleh DK PBB akibat uji coba nuklir Korut yang ketiga.
Perbedaan dengan penelitian terdahulu		Terletak pada objek penelitian yaitu penelitian Isnaeni melihat pergeseran kebijakan luar negeri Tiongkok sebagai respon uji coba nuklir Korut, sedangkan skripsi ini akan melihat kebijakan luar negeri Tiongkok hanya cakupan kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea.		

Sumber: Feng Zhu, (2011), Juyan Zhang & Yi Han (2012), Ramon Pacheco Pardo (2012), Scobell Andrew & Cozad Mark (2014), Nur Afyah (2017)

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu banyak menjelaskan mengenai peran Tiongkok terutama dalam penurunan kapabilitas militer nuklir Korut dengan menggunakan sanksi internasional. Selain itu juga penelitian terdahulu tidak secara eksplisit menjelaskan kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea pada tahun 2017 hingga 2018. Akan tetapi, penelitian terdahulu dapat digunakan oleh penulis untuk melihat peran dan upaya Pemerintah Tiongkok dalam mendenuklirisasi nuklir Korut di tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Kerangka Analitis

Penelitian ini menggunakan konsep yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan perdamaian, yaitu konsep kepentingan nasional (*national interest*) dan perdamaian (*peace*). Konsep ini diharapkan dapat menjelaskan kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea tahun 2017-2018.

2.2.1 Konsep Kepentingan Nasional

Dalam skripsi ini, penulis melihat dinamika kepentingan Tiongkok dalam menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea. Beberapa pakar/pemikir hubungan internasional seperti Hans J. Morgenthau, Thucydides, Machiavelli, E.H. Carr, dan Donald E. Nuechterlein secara eksplisit menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan adanya kemampuan negara untuk meningkatkan kekuatannya di berbagai elemen yaitu ekonomi, keamanan, ideologi, dan sistem internasional.

Konsep kepentingan nasional sendiri lahir dari paradigma realisme klasik oleh Hans J. Morgenthau, pemikir realisme terkemuka yang mengatakan bahwa kepentingan merupakan kekuatan politik (*political power*) sebagai lingkup otonom terpisah dari bidang lain seperti ekonomi (didefinisikan sebagai kekayaan), etika, estetika atau agama. Hal ini akan menciptakan kepentingan dalam kebijakan luar negeri masing-masing negara.²¹

Morgenthau mengakui, negara-negara di dunia yang berdaulat terus-menerus bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu, digunakan instrumen kebijakan luar negeri untuk mempertimbangkan kelangsungan hidup nasional di berbagai negara-bangsa. Kepentingan nasional biasanya terdapat dalam setiap konstitusi negara, sehingga harus diperjuangkan dalam melindungi identitas politis (wilayah, tanah, teritorial), identitas politik (rezim ekonomi politik), dan identitas kultural (norma, etnis, linguistik, sejarah) dari gangguan negara-bangsa lain.²²

²¹ Hans J Morgenthau dan Kenneth W Thompson (1997). *Politics among Nations: the Struggle for Power and Peace sixth edition*. New York: McGraw-Hill, hal 5.

²² Hans J Morgenthau (1952). *Another Great Debate: The National Interest of United States*. *American Political Science Review*, 961-998.

Dalam praktiknya Thucydides justru melihat bahwa kepentingan nasional ditunjukkan melalui berbagai konflik dan kekerasan karena negara hanya akan mengejar kekuasaan dan pengaruh jika mereka ingin bertahan hidup.²³ Dalam lingkungan yang inheren, baik kemanusiaan maupun negara seperti yang ditunjukkan Machiavelli, hanya ada sedikit ruang untuk menggunakan moral dan kerja sama, sehingga sifat manusia seperti terlihat mementingkan diri sendiri, lalu moralitas dan keadilan tidak lebih dari sekadar cerminan hegemoni²⁴ kekuatan-kekuatan besar.²⁵ Senada dengan pernyataan diatas, E.H. Carr juga mengatakan bahwa minat negara umumnya hanya berfokus pada kepentingan negaranya saja seperti kepentingan dalam istilah ekonomi, militer, dan teritorial serta aliansi antarnegara yang dapat menimbulkan stabilitas tertentu, melalui keseimbangan kekuasaan, tetapi ini akan terus dirusak oleh persaingan antarnegara.²⁶

Selanjutnya kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein, seorang pensiunan diplomat AS sekaligus akademisi pada *Federal Executive Institute*, kepentingan nasional adalah kepentingan yang dirasakan dan diinginkan oleh beberapa negara yang berdaulat dan lingkungan luar disekitarnya. Seringkali kepentingan nasional juga terkait erat dengan kebijakan luar negeri suatu negara. Donald E. Nuechterlein juga mengklasifikasikan empat jenis kepentingan nasional yaitu **kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tata internasional**, dan kepentingan ideologi. Kepentingan pertahanan merupakan

²³ Thucydides. (1970). *History of the Peloponnesian War*, London: Penguin, Book V, hal. 85–113.

²⁴ Penelitian ini hanya membatasi/mengaitkan unsur hegemoni dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Persoalan/analisis mengenai hegemoni di negara tertentu dalam konteks perdamaian tentu membutuhkan analisis tersendiri.

²⁵ Machiavelli, N. (2005). *The Prince*. Oxford: Oxford University Press. [1532].

²⁶ E.H Carr (1939). *Twenty Years Crisis*. London: Macmillan dalam Oliver P. Richmond, (2008). *Peace in International Relations*. London and New York: Routledge, hal 47

kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayah dan sistem politik dari ancaman negara lain.

Kemudian kepentingan ekonomi merupakan kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain. Kepentingan tata internasional, yaitu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya dari ancaman luar. Terakhir, kepentingan ideologi merupakan kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.²⁷

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, diperoleh persamaan pemikiran mengenai konsep kepentingan nasional yang dapat digunakan sebagai indikator penelitian ini, yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan tata internasional. Ketiga indikator didalam konsep ini relevan guna menganalisis kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Konsep tersebut digunakan untuk melihat berbagai kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea selain untuk kepentingan pertahanan dan tata internasional dalam menciptakan kondisi aman di kawasan Asia Timur khususnya normalisasi Semenanjung Korea dan juga adanya upaya Tiongkok dalam rangka mempromosikan kepentingan ekonominya.

Oleh karena itu, untuk dapat melihat lebih jauh kepentingan nasional Tiongkok dari berbagai elemen seperti kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan tata internasional yang digunakan penulis untuk

²⁷ Donald E Nuechterlein (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies*, Vol 2, hal 248.

menganalisis kebijakan luar negeri Tiongkok sebagai orientasi/arah pengambilan keputusan luar negeri melalui dokumen, laporan, dan situs mengenai kebijakan Tiongkok pada interval waktu tahun 2017-2018.

2.2.2 Konsep Perdamaian

Perdamaian didefinisikan sebagai **kondisi ketiadaan perang**. Johan Galtung menambahkan perdamaian bukan hanya kondisi tidak adanya kekerasan tetapi perdamaian di ibaratkan sebagai koin yang memiliki dua sisi yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif diartikan sebagai tidak adanya kekerasan pribadi atau individu sedangkan perdamaian positif diartikan sebagai tidak adanya kekerasan struktural atau ketidakadilan sosial.²⁸ Perdamaian positif dapat dikatakan sebagai suatu proses negosiasi diplomatik yang digunakan untuk menghilangkan sumber perang dan menyelesaikan konflik internasional dengan cara damai. Perdamaian secara harfiah didefinisikan sebagai alat untuk mengakhiri perang atau konflik. Pandangan perdamaian adalah kehadiran keadilan, tata tertib, hukum, pemerintah, hubungan baik, kesejahteraan, kebebasan, menghormati hak asasi manusia, keamanan, dan lain-lain atau tidak adanya kekerasan.²⁹

Konsep perdamaian dalam perspektif realisme berkaitan dengan hegemoni pemenang, norma-norma, lembaga, perspektif sistem sosial, ekonomi, dan politik. Bagi realisme, perdamaian adalah *zero-sum* yaitu membatasi pemahaman perdamaian ke dalam batas-batas negara dimana masing-masing negara memiliki

²⁸ Johan Galtung. (1995). *Violence, Peace, and Peace Research, Essays on Peace: Paradigms for Global Order*. Central Queensland University press, hal 15

²⁹ The Shodhganga Inlibnet Centre. (2014). *Chapter two concept of peace*. Diambil kembali dari <http://shodhganga.inlibnet.ac.in/bitstream/10603/36399/7/chapter%202.pdf>

suatu kepentingan guna mendominasi kekuasaan dalam suatu wilayah. Pada akhirnya, perdamaian versi realisme disamakan dengan sistem imperialisme atau *Leviathan*.³⁰

Menurut Hobbes, hukum alam menuntut manusia untuk mencari perdamaian yang didasarkan pada **pembentukan kontrak**. Oleh karena itu, untuk mencegah dorongan alamiah melanggar kontrak-kontrak tersebut, didirikan sebuah persemakmuran menggunakan otoritas kedaulatannya yang disediakan oleh kontrak sosial guna menjamin kelangsungan hidupnya dengan menciptakan rasa takut akan hukuman yang biasa disebut *Leviathan*. Persemakmuran tersebut didirikan berdasarkan kesepakatan kelembagaan atau akuisisi paksa dan kesamaan pengetahuan mengenai kedaulatan yang diperlukan untuk menjamin perdamaian sipil (dapat bergantung pada demokrasi atau kerangka pemerintahan feodal).³¹

Selanjutnya Hobbes mengatakan bahwa perdamaian sipil yang paling baik dapat dilakukan melalui monarki, di mana tidak ada peluang ketidaksepakatan tentang kebijakan yang telah dibuat. Karena sistem internasional merupakan keadaan anarkis, implikasinya adalah perang dapat mengarah pada perdamaian internasional hanya jika seorang pemenang mampu memaksakan kehendaknya pada semua negara lain. Dalam hal ini realisme dapat menghasilkan perdamaian terbatas yang berfokus pada kelangsungan hidup dan bertumpu pada satu negara atau sebuah aliansi negara atau hegemoni yang mungkin lebih dikenal sebagai imperialisme.³²

³⁰ Oliver P Richmond. (2008). *Peace in International Relations*. London and New York: Routledge, hal 40

³¹ *Ibid*, hal 41

³² Penelitian ini hanya membatasi/mengaitkan unsur imperialisme dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Persoalan/analisis mengenai imperialisme di negara tertentu dalam konteks perdamaian tentu membutuhkan analisis tersendiri.

Konsep perdamaian dalam realisme juga dijelaskan oleh pakar realisme klasik, yaitu Morgenthau percaya bahwa perdamaian hanya berada pada **kemenangan dari para pemenang yang terbatas** (*limited victor's peace*)³³, hal ini dikarenakan adanya sedikit pengakuan atas sistem, nilai, dan norma yang telah disepakati bersama. Kemudian, masing-masing negara akan memperjuangkan kepentingannya (kekuatan dan persaingan antar-bangsa) yang memunculkan keseimbangan kekuasaan. Pada akhirnya, keseimbangan kekuasaan ditujukan hanya untuk mengendalikan perang daripada proliferasinya.³⁴ Selanjutnya, pemikir realisme terkemuka, E.H Carr, memandang perdamaian sebagai moralitas di tingkat internasional dan proyeksi kepentingan negara-negara dominan.³⁵ Menurutnya, perdamaian hanyalah sebuah harapan yang pada akhirnya tidak adanya pemisahan hubungan antara kekuasaan dan moralitas.³⁶

Sedangkan, menurut Mearsheimer, sifat perdamaian tidak dapat disangkal bahkan jika itu tidak dapat dicapai. Mearsheimer menggambarkan senjata nuklir digunakan sebagai agen perdamaian karena adanya konsekuensi mengerikan dari penggunaannya. Maka, gencatan senjata menjadi pilihan terbaik untuk mencapai perdamaian walaupun hal ini tidak mudah bagi negara-negara terutama mereka yang bergantung pada kekuatan, kepentingan militer, dan ekonomi.³⁷

³³ *The Victor's Peace* merupakan istilah kemenangan dari para pemenang. Gagasan ini melihat perdamaian yang berasal dari kemenangan militer dan di dominasi oleh pemenang dalam suatu konflik. Pemenang dapat melakukan hal tidak adil bahkan memaksa musuh untuk tertib. Walaupun begitu kerangka ini memiliki banyak kekurangan yaitu tunduk pada masalah perluasan wilayah strategis dan ketidakmampuan untuk mengendalikan musuh yang ditaklukan. Lihat selengkapnya Oliver P Richmond, *Peace in International Relations*; (London and New York; Routledge,2008).

³⁴ Hans J Morgenthau. (1968). *Politics Among Nations, 4th ed.* New York: McGraw Hill, hal 237.

³⁵ E.H Carr. (1939). *Twenty Years Crisis.* London: Macmillan, hal 68.

³⁶ *Ibid*, hal 97.

³⁷ John Mearsheimer. (1998). *The False Promise of International Institutions.* Dalam M.E. Brown, Owen R. Coates, Sean M. Lynn-Jones and Steven E. Millar, *Theories of War and Peace*, Cambridge: MIT Press.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, didapatkan persamaan pemikiran mengenai konsep perdamaian yang dapat digunakan sebagai indikator penelitian, yaitu: **kondisi ketiadaan perang, pembentukan kontrak, dan *limited victor's peace***. Ketiga indikator di dalam konsep ini relevan dalam menganalisis kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea.

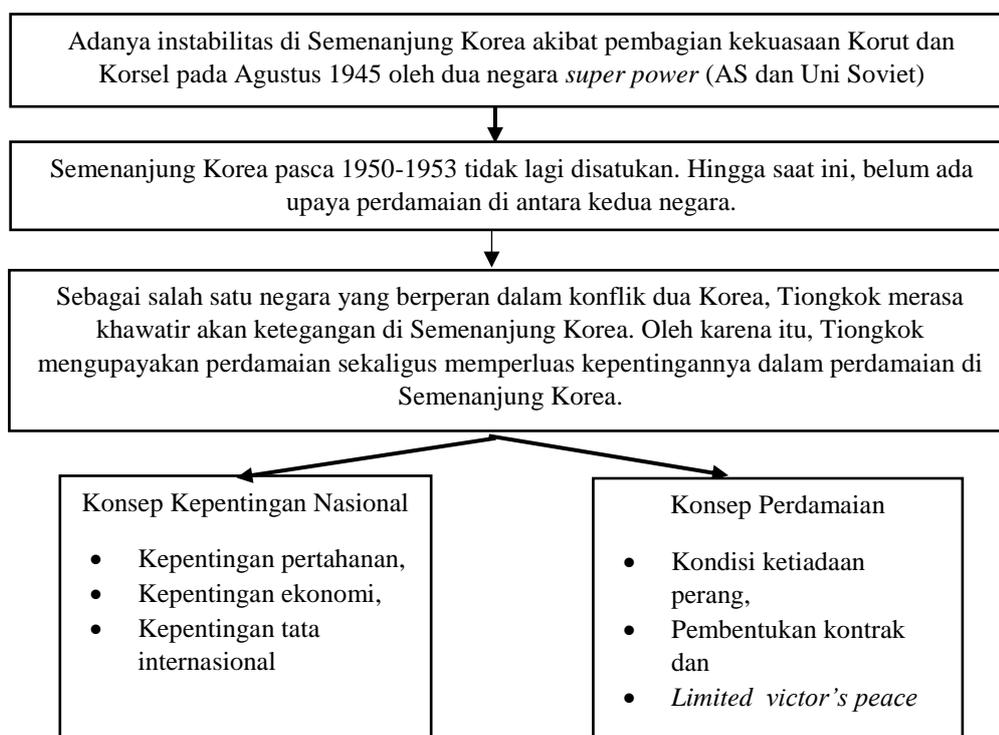
2.3 Kerangka Pikir

Pada bagian ini, penulis menjelaskan apa saja kepentingan Tiongkok yang dilihat berdasarkan konsep kepentingan nasional, yakni upaya yang dilakukan suatu negara dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan nasionalnya, baik dalam bidang pertahanan, ekonomi, dan tata internasional. Kemudian konsep perdamaian digunakan untuk menjelaskan proses perkembangan kondisi ketiadaan perang, pembentukan kontrak dan *limited victor's peace* setelah adanya Deklarasi Panmunjom dan masa depan perdamaian yang dicita-citakan di Semenanjung Korea pada interval waktu tahun 2017 hingga 2018.

Penulis menggunakan konsep perdamaian untuk menjelaskan tujuan penelitian pertama, yakni perdamaian di Semenanjung Korea selama periode 2017-2018 dan konsep kepentingan nasional digunakan penulis untuk menjelaskan tujuan penelitian kedua, yakni menganalisis kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea dalam kurun waktu 2017-2018.

Kedua konsep tersebut nantinya menggunakan perspektif realisme yaitu keamanan dan kepentingan menempati peringkat pertama dalam keberlangsungan hidup sebuah negara. Maka, konsep kepentingan nasional dan perdamaian digunakan untuk mendeskripsikan sikap Tiongkok dalam perdamaian di

Semenanjung Korea yang dibuktikan dengan *military strategy* Tiongkok, laman resmi serta kebijakan luar negeri Tiongkok tahun 2017 hingga 2018. Berdasarkan pemaparan di atas, kerangka pikir yang dapat oleh penulis gambarkan ialah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan penelitian secara deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan induktif untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Pertanyaan penelitian dalam metode kualitatif bersifat terbuka, berevolusi, dan tidak terarah serta menegaskan tujuan penelitian dalam istilah yang lebih spesifik dimulai dengan kata apa atau bagaimana daripada mengapa dengan jumlah yang sedikit.³⁸ Creswell menambahkan, di dalam metode penelitian kualitatif terdapat lima pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan naratif, fenomenologi, etnografi, *grounded theory*, dan studi kasus.³⁹

Adapun penelitian ini secara spesifik menggunakan pendekatan studi kasus dimana penulis akan berfokus pada isu fenomena kontemporer (masa kini). Studi kasus ini dapat menjadi metode yang mendalam dalam melakukan evaluasi.⁴⁰ Kemudian data-data akan diambil secara sekunder, yaitu menggunakan berbagai buku-buku, jurnal, dokumen, dan laman resmi yang digunakan untuk

³⁸ J. W Creswell. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. Thousand Oaks, California: Sage Publications, hal 107.

³⁹ *Ibid*, hal 156.

⁴⁰ Robert K Yin. (2014). *Case Study Research: Design and Methods; Fifth edition*. United States of America: SAGE Publications, Inc.

menginterpretasikan kerangka analitis yang bermanfaat untuk memberikan gambaran umum mengenai latar penelitian dan bahan pembahasan hasil penelitian.

Jenis penelitian ini diambil oleh penulis untuk membuat prediksi serta mendapatkan esensi dari suatu masalah yang akan dipecahkan penulis terutama pada kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Asia Timur khususnya Semenanjung Korea, berdasarkan kerangka analitis yang digunakan, yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan tata internasional serta indikator konsep perdamaian yang diperoleh dari para pemikir perdamaian, yakni ketiadaan perang, pembentukan kontrak, dan *Limited victor's peace*.

3.2 Fokus Penelitian

Pada fokus penelitian ini, penulis berfokus kepada kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea dari tahun 2017 hingga 2018. Fokus penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan pada hasil penelitian penulis.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui sumber-sumber, yaitu berupa jurnal, buku, laporan tertulis, dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek yang diteliti terutama yang berkaitan dengan kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea. Data ini kemudian diolah, dideskripsikan, dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip maupun dokumen resmi, yakni sebagai berikut:

1. *China Security Report* tahun 2018 dan 2019 dari *The National Institute for Defense Studies* (NIDS)
2. *White Paper on Human Rights in North Korea* tahun 2011 dari *Korea Institute for National Unification*
3. *North Korea Refugees in China : Repatriation of Refugees and Border Conditions* tahun 2017 dan 2018 dari *Congressional Executive Commission on China* (CECC)
4. *North Korea's Other Top Trading partners* tahun 2017, 2018, dan 2019 dari *The National Committee on North Korea* (NCNK)
5. *Import/Export By Country : Balance Payment of Year with China* tahun 2019 dari *Korea Custom Services* (KCS)

Adapun data yang digunakan berupa data dari tahun 2017 sampai dengan 2018 mengenai dinamika kepentingan Tiongkok dalam mencapai perdamaian di Semenanjung Korea.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan *library research* bersumber dari data-data sekunder yang berasal dari buku-buku, dokumen historis, artikel, surat kabar, jurnal, dan data *website* resmi yang bertujuan untuk memberikan informasi relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan

diteliti. Teknik ini juga dipandang memberikan informasi yang valid dalam rangka penulisan penelitian.

3.5 Level dan Unit Analisis

Dalam penulisan skripsi ini, level analisis penelitian berada pada tataran negara-bangsa yaitu menekankan pada semua pembuat keputusan di suatu negara dengan sekelompok negara di negara lain. Dengan kata lain, peneliti melihat proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu politik luar negeri oleh suatu negara-bangsa sebagai suatu unit yang utuh.⁴¹ Penulis menetapkan unit analisis, yaitu kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea tahun 2017 sampai dengan 2018. Sedangkan unit eksplanasi, yaitu Perdamaian di Semenanjung Korea tahun 2017 selama periode tahun 2018, penulis gambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Level dan Unit Analisis

Level/Tingkat Analisis : Negara-bangsa (Tiongkok)	
Level Analisis	Unit Eksplanasi
Kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea tahun 2017-2018	Perdamaian di Semenanjung Korea tahun 2017-2018

Sumber: Data diolah oleh penulis

⁴¹ Mohtar Mas'oed. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), hal 47.

3.6 Validitas Data

Pada validitas data penelitian kualitatif, penulis menggunakan teknik triangulasi data. Menurut Lisa A. Guinon, Triangulasi memiliki lima jenis, yaitu: *data triangulation*, *investigator triangulation*, *theory triangulation*, *methodological triangulation*, dan *environmental triangulation*.⁴² Selain itu, untuk mendukung keabsahan data, penulis menggunakan *data triangulation* dengan cara membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan informasi secara objektif dari berbagai sumber-sumber data sekunder yang berbeda baik berupa buku, jurnal, dokumen, dan *website* resmi dalam rangka mendukung sebuah validitas penelitian serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.7 Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan analisis data kualitatif, teknik ini menyiapkan dan mengorganisir dokumen atau catatan menjadi data dan akhirnya mewakili data dalam bentuk tabel, figur atau gambar atau diskusi.⁴³ Tahapan terakhir penulis ialah, menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dengan tujuan memperoleh informasi dan pengetahuan baru untuk penelitian selanjutnya mengenai kepentingan Tiongkok dalam perdamaian di Semenanjung Korea tahun 2017 hingga 2018.

⁴² Lisa A. Guinon, (2002). "Triangulation: Establishing the Validity of Qualitative Studies". University of Florida, hal 3.

⁴³ J. W Creswell. (2007). *op.cit.*, hal 148.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini memaparkan kondisi umum Tiongkok yang mencakup letak geografis, perkembangan identitas nasional serta kebijakan luar negeri pada masa Pemerintahan Xi Jinping. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melihat arah kebijakan luar negeri Tiongkok pada interval tahun 2017-2018.

4.1 Gambaran Umum Tiongkok

Tiongkok merupakan negara yang memiliki luas wilayah terbesar keempat setelah kawasan AS. Tiongkok memiliki total luas wilayah sebesar 9.596.960 km² yang mencakup daratan sebesar 9.326.410 km² dan perairan sebesar 270.550 km². Selain itu, Tiongkok berada di kawasan Asia Timur yang berbatasan dengan Laut Tiongkok Timur, Teluk Korea, Laut Kuning, dan Laut Tiongkok Selatan serta berada diantara Korut dan Vietnam.⁴⁴

Pada perkembangan identitas nasional Tiongkok di awal tahun 2013, Presiden Xi Jinping memperkenalkan konsep *Chinese Dream*⁴⁵ untuk peremajaan

⁴⁴ *Central Intelligence Agency (CIA). (2018). East Asia/Southeast: China-The World Factbook.* Diambil kembali dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html>

⁴⁵ Slogan propaganda Xi Jinping untuk menjadikan Tiongkok sebagai negara adikuasa global dan bangsa yang unggul di dunia. Xi menggarisbawahi ini selama pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, dimana Xi menampilkan dirinya sebagai juara perdagangan bebas dan kerja sama global. Lihat selengkapnya di *The Chinese Dream and Xi Jinping's power politics* diambil dari <https://dw.com/en/the-chinese-dream-and-xi-jinpings-power-politics/a-41941966>

besar bangsa Tiongkok/*the great rejuvenation of the Chinese nation*, yakni mendorong kebijakan luar negeri agar lebih proaktif dan menjadi ekonomi terbesar kedua untuk menarik perhatian global di seluruh dunia. Selanjutnya pada November 2012, Kongres Nasional *Communist Party of China* (CPC) ke-18 telah menetapkan beberapa prinsip kebijakan luar negeri Tiongkok yaitu mempertahankan strategi pembangunan jalan yang damai/*path of peaceful development* yakni perkembangan Tiongkok dalam mencari lingkungan internasional yang damai, mempromosikan perdamaian dunia, dan memperdalam hubungan yang saling ketergantungan dengan komunitas internasional di tengah-tengah multipolaritas politik internasional serta globalisasi ekonomi dunia.⁴⁶

Xi Jinping turut menyatakan bahwa diperlukan lingkungan internasional yang damai bagi Tiongkok untuk mencapai tujuannya. Tujuan dari jalan ini ialah untuk mencapai peremajaan nasional melalui cara-cara damai, sementara pada saat yang sama mempromosikan kemakmuran negara-negara lain. Strategi pembangunan jalan yang damai tersebut tidak hanya menggabungkan perdamaian dengan pembangunan saja, tetapi juga menghubungkan urusan domestik dengan urusan internasional. Selain itu, juga dapat menghubungkan kepentingan satu negara dengan kepentingan masyarakat internasional.⁴⁷ Lebih jauh, Xi Jinping menekankan bahwa Tiongkok mengikuti pembangunan jalan yang damai, yakni sebagai seorang praktisi pembangunan damai, promotor pembangunan bersama,

⁴⁶ *People's Daily*, 23 Desember 2005 dalam Masafumi Iida. (2019). Chapter 1; China's Foreign Strategy Causes Friction with the Existing World Order. *China Security Report 2019. China's Strategy for Reshaping the Asian Order and Its Ramifications*, hal 6

⁴⁷ Wang Yi. (2014). *Peaceful Development and the Chinese Dream of National Rejuvenation* diambil kembali dari CIIS: http://www.ciis.org.cn/english/2014-03/11/content_6733151.htm)

pelindung sistem perdagangan multinasional, dan peserta tata kelola ekonomi global.⁴⁸

Xi Jinping juga menekankan bahwa Tiongkok akan secara gigih melindungi kepentingan intinya, yaitu kedaulatan negara, keamanan nasional, integritas wilayah, reunifikasi nasional, stabilitas umum sistem politik Tiongkok yang didirikan oleh konstitusi, dan lebih dari semua stabilitas sosial serta perlindungan dasar untuk memastikan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.⁴⁹ Hal tersebut sejalan dengan buku putih pertahanan Tiongkok tahun 2013, kebijakan luar negeri Beijing yang digambarkan yakni sebagai berikut:

- *It is China's unshakable national commitment and strategic choice to take the road of peaceful development.*
- *China unswervingly pursues an independent foreign policy of peace and a national defense policy that is defensive in nature.*
- *China opposes any form of hegemonism or power politics, and does not interfere in the internal affairs of other countries.*
- *China will never seek hegemony or behave in a hegemonic manner, nor will it engage in military expansion.*
- *China advocates a new security concept featuring mutual trust, mutual benefit, equality and coordination, and pursues comprehensive security, common security and cooperative security.*

(Terjemahan bebas:

- Ini adalah komitmen nasional Tiongkok yang tak tergoyahkan dan pilihan strategis untuk mengambil pembangunan jalan yang damai.
- Tiongkok dengan teguh menegakkan kebijakan luar negeri yang independen mengenai perdamaian dan kebijakan pertahanan nasional yang bersifat defensif.
- Tiongkok menentang segala bentuk hegemonisme atau politik kekuasaan dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara-negara lain.
- Tiongkok tidak akan pernah mencari hegemoni atau berperilaku hegemonik, juga tidak akan melakukan ekspansi militer.
- Tiongkok menganjurkan konsep keamanan baru yang menampilkan rasa saling percaya, saling menguntungkan, kesetaraan dan koordinasi, dan

⁴⁸ *People's Daily*, 30 Januari 2013 dalam dalam Masafumi Iida. (2019). Chapter 1; China's Foreign Strategy Causes Friction with the Existing World Order. *China Security Report 2019. China's Strategy for Reshaping the Asian Order and Its Ramifications*, hal 6

⁴⁹ *People's Daily*, 7 September 2011 dalam Masafumi Iida.,*op.cit.*, hal 7

mengupayakan keamanan komprehensif, keamanan bersama dan kerja sama keamanan)⁵⁰

Sedangkan, pada Kongres Nasional CPC ke-19 yang diadakan pada bulan Oktober 2017, Xi Jinping menjelaskan diplomasi negara besar dengan karakteristik Tiongkok/*major-country diplomacy with Chinese characteristics*⁵¹ sebagai tujuan kebijakan luar negeri Tiongkok dalam membentuk hubungan internasional yang baru dan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Senada dengan pernyataan Xi Jinping, Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi menerbitkan artikel berjudul *A New Era of China's Foreign Policy* di *Chinausfocus* pada 18 Desember 2017 yang mengatakan bahwa Kongres Nasional CPC ke-19 telah membuka cakrawala baru bagi sosialisme dengan karakteristik Tiongkok saat ini.

Dalam konteks tersebut, upaya Tiongkok menuju dua tujuan dan visi diplomatiknya untuk masa depan, menjadi lebih jelas. *Pertama*, untuk memajukan *Belt and Road Initiative* (BRI).⁵² Wang Yi mengatakan bahwa Tiongkok sejauh ini telah menandatangani perjanjian kerja sama *Belt and Road* dengan 80 negara dan

⁵⁰ “*Chinese National Security Decision-Making: Processes and Challenges.*” Brookings, May 2013. Diambil kembali dari <http://www.brookings.edu/research/papers/2013/05/chinese-national-security-decision-making-sun>, hal 17-24

⁵¹ Wang Yi menyebut bahwa pola pikir yang ketinggalan jaman dari hubungan *zero-sum* harus diganti dengan pendekatan baru, yaitu bekerja untuk pembangunan bersama dan berbagi manfaat. Dalam diplomasi negara besar dengan karakteristik Tiongkok, Tiongkok akan tetap menjadi kontributor yang teguh untuk perdamaian dunia, fasilitator pembangunan, dan pendukung tatanan internasional. Lihat selengkapnya di Wang Yi. (2017). *A New Era of China's Foreign Policy*. Diambil kembali dari [Chinausfocus.com](http://chinausfocus.com): <https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/chinas-diplomacy-breaking-new-ground>

⁵² Sebuah program untuk menghubungkan Afrika dan Eropa melalui jaringan darat dan maritim sepanjang enam koridor dengan tujuan meningkatkan integrasi regional, perdagangan, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. BRI terdiri dari jalur sutra; jalur lintas benua yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah, Rusia, dan Eropa melalui jalur darat dan jalur sutra maritim abad ke 21, rute laut yang menghubungkan wilayah pesisir Tiongkok dengan Asia Tenggara dan Asia Selatan, Pasifik Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Timur sampai ke Eropa. Lihat selengkapnya di *European Bank for Reconstruction and Development* (EBRD). *Belt and Road Initiative* (BRI) diambil kembali dari <https://www.ebrd.com/what-we-do/belt-and-road/overview.html>

organisasi serta membangun 75 zona kerja sama ekonomi dan perdagangan luar negeri di 24 negara. Kemudian bisnis Tiongkok telah menginvestasikan lebih dari US\$50 miliar dan menciptakan hampir 200.000 pekerjaan lokal di negara-negara yang berpartisipasi pada *Belt and Road Forum* (BRF).⁵³

Kedua, Tiongkok telah bertindak sebagai pendukung kuat untuk globalisasi ekonomi. Dalam pidatonya di *World Economic Forum* (WEF), Davos pada awal tahun 2017, Presiden Xi Jinping meminta negara-negara untuk bekerja sama melawan tantangan proteksionisme dan mendorong pertumbuhan global yang lebih seimbang dan adil. Hal ini menandakan munculnya Tiongkok sebagai kekuatan paling dinamis untuk meningkatkan pemerintahan global.⁵⁴

Ketiga, Tiongkok telah bekerja secara proaktif untuk mempromosikan hubungan yang stabil dengan negara-negara besar seperti adanya interaksi yang efektif antara Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump yaitu kedua pemerintah sepakat untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang dan mengelola perbedaan atas dasar saling menghormati. Selain itu, Presiden Xi Jinping dan Presiden Putin dari Rusia bertemu untuk berkoordinasi terhadap isu-isu utama seperti stabilitas strategi global dan strategi pengembangan bersama yang penting untuk revitalisasi Eurasia. Kemitraan strategis antara Tiongkok-Rusia telah menjadi landasan bagi perdamaian, stabilitas dunia, keadilan, dan kerja sama yang saling menguntungkan.⁵⁵

Keempat, Tiongkok dan Korsel telah mengatasi menurunnya hubungan mereka yang disebabkan oleh penyebaran sistem THAAD. Administrasi Moon Jae-

⁵³ Wang Yi., *op.cit.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

in telah membuat komitmen publik penting untuk mempertimbangkan kekhawatiran Tiongkok mengenai keamanan strategisnya. Pada akhirnya Tiongkok dan Korsel saat ini menuju pada pengembangan hubungan bilateral yang positif dan perdamaian serta stabilitas di Semenanjung Korea.⁵⁶

Mengenai masalah nuklir di Semenanjung Korea, Tiongkok tetap berkomitmen untuk menegakkan rezim non-proliferasi internasional, menjaga perdamaian dan stabilitas, mencapai denuklirisasi serta menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi. Tiongkok telah sepenuhnya dan secara ketat menerapkan resolusi DK PBB yang relevan. Kemudian mengajukan proposal *suspension for suspension* yang menyerukan penangguhan aktivitas nuklir dan rudal Korut serta penangguhan latihan militer berskala besar antara AS dan Korsel. Bahkan ketika situasi di Semenanjung Korea berada dalam lingkaran provokasi dan konfrontasi yang kejam, Tiongkok percaya bahwa kemungkinan perdamaian dan negosiasi tetap ada, Beijing terus bergerak melampaui konfrontasi dan menciptakan kondisi yang tepat untuk memulai kembali dialog perdamaian.⁵⁷

Dalam tulisannya Wang Yi juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Tiongkok di era baru saat ini ialah untuk mengembangkan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Wang Yi menganjurkan prinsip-prinsip hubungan negara ke negara dalam mendorong bentuk hubungan internasional yang baru, yaitu saling menghormati, keadilan, dan kerja sama saling menguntungkan. Menurutnya negara-negara dengan ukuran dan kekuatan yang berbeda, sistem,

⁵⁶ Wang Yi., *op.cit.*

⁵⁷ *Ibid.*

agama dan peradaban yang beragam, semuanya setingkat. Hukum rimba yang menempatkan negara lemah pada belas kasihan yang kuat harus ditolak.⁵⁸

Selanjutnya, pada Juli 2018, Tiongkok bersama dengan *Central and Eastern Europe* (CEE) mengadakan KTT 16+1⁵⁹ di Bulgaria yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan BRI sekaligus meredakan kekhawatiran Eropa Barat mengenai Tiongkok. Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang, menekankan bahwa proyek BRI tersebut akan bermanfaat bagi seluruh benua, membantu pengembangan bersama di kawasan, dan proses integrasi Eropa serta kerja sama 16+1 yang akan membantu menurunkan kesenjangan di negara Eropa.⁶⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa Tiongkok saat ini menjadi negara *rising power* yang semakin besar dan tidak hanya mengejar kepentingan di dalam negerinya, tetapi juga turut mempertahankan hubungan dengan negara tetangga yang baik berdasarkan kerja sama ekonomi dan kerja sama strategis baru dengan negara-negara tetangganya. Penulis melihat bahwa pada perkembangan kebijakan luar negeri Tiongkok sendiri berorientasi kepada peningkatan ekonomi, disamping dengan adanya peningkatan hubungan kerja sama yang saling bergantung satu sama lain. Pemerintahan Xi Jinping saat ini berkeinginan membentuk sebuah tatanan internasional yang mengusung konsep *Chinese Dream* melalui pembangunan jalan yang damai, mempertahankan

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Format 16+1 merupakan inisiatif dari Tiongkok yang bertujuan untuk mengintensifkan dan memperluas kerja sama dengan 11 negara anggota Uni Eropa (UE) dan 5 negara Balkan (Albania, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Makedonia, Montenegro, Polandia, Rumania, Serbia, Slovakia, Slovenia) di bidang investasi, transportasi, keuangan, sains, pendidikan, dan budaya. Dalam hal ini, Tiongkok telah menetapkan tiga area prioritas potensial untuk kerja sama ekonomi, yaitu: infrastruktur, teknologi tinggi dan teknologi hijau. Lihat selengkapnya di <http://ceec-china-latvia.org/page/about>

⁶⁰ People's Daily, 8 Juli 2018 dalam Masafumi Iida. (2019). Chapter 1; China's Foreign Strategy Causes Friction with the Existing World Order. *China Security Report 2019. China's Strategy for Reshaping the Asian Order and Its Ramifications*, hal 22

kepentingan inti, membangun sebuah bentuk hubungan internasional baru, dan komunitas masa depan bersama sekaligus menggunakan diplomasi besar dengan karakteristik Tiongkok yang dirangkum menjadi BRI.

Tiongkok mengakui bahwa BRI merupakan salah satu upayanya dalam meningkatkan kerja sama ekonomi dengan berbagai negara. Selain itu, BRI juga digunakan untuk mengamankan posisi Tiongkok sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia; walaupun, Tiongkok tidak secara eksplisit menjelaskan BRI dapat menjadi sebuah strategi Tiongkok untuk mengamankan kepentingan intinya melalui cara-cara damai tanpa menyebabkan permusuhan antarnegara. Akan tetapi, jalur koridor yang ditetapkan Tiongkok tidak lain merupakan upaya untuk menghancurkan nilai-nilai Barat akan ide-ide hegemoni dan digantikan dengan upaya keseimbangan kekuasaan berbentuk distribusi kekuatan di bidang ekonomi.

Kemudian, kebijakan dasar Tiongkok terhadap permasalahan Semenanjung Korea, Tiongkok terlihat sebagai negara yang memegang posisi strategis baik dalam menjaga stabilitas dan dialog bilateral maupun multilateral. Tiongkok juga turut mempertahankan hubungannya dengan kedua-Korea agar dapat mempercepat proses perdamaian di Semenanjung Korea. Presiden Xi Jinping bahkan bersedia menemui Pemimpin Korut, Kim Jong-un, selama tiga kali dalam setahun, yakni pada Maret, Mei, dan Juni 2018 untuk memperdalam kerangka kerja sama strategis dalam hal denuklirisasi nuklir Korut. Kemudian, Beijing terlihat telah memperbaiki hubungannya dengan Korsel sejak kunjungan Presiden Moon Jae-in ke Tiongkok pada Desember 2017.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka diketahui bahwa “Kepentingan Tiongkok dalam Perdamaian di Semenanjung Korea, 2017-2018”, yaitu:

- Kepentingan Tiongkok di bidang pertahanan, yaitu melihat Semenanjung Korea sebagai tempat mempertahankan perdamaian dan stabilitas untuk melindungi pembangunan jalan yang damai dan kepentingan intinya. Tiongkok juga perlu mempertahankan atau memperluas pengaruhnya di Semenanjung Korea sekaligus merusak dominasi AS di wilayah itu sebagai cara untuk mempersiapkan persaingan strategis melawan hegemon *de facto* yang ada saat ini. Selain itu, Tiongkok perlu mengembangkan hubungan strategis dengan Korsel dan mengelola rezim Korut agar terus stabil.
- Kepentingan Tiongkok di bidang ekonomi menggunakan skema *One Belt, One Road* (OBOR) yang bertujuan untuk membangun hubungan kerja sama ekonomi yang terintegrasi antara Tiongkok dengan negara-negara di Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa. Pembangunan jalur kereta api yang akan menghubungkan Kota Dandong Provinsi Liaoning Tiongkok dengan Ibukota Korut, Pyongyang dan Ibukota Korsel, Seoul membuka kesempatan bagi Tiongkok disamping

mengupayakan perdamaian, juga dapat memperluas pasarnya ke Semenanjung Korea.

- Kepentingan Tiongkok di bidang tata internasional, menekankan pada prinsip-prinsip pembangunan jalan yang damai serta peningkatan integrasi liberal menuju tipe hubungan internasional baru ke arah saling menguntungkan melalui dialog bilateral, multilateral, dan membangun kepercayaan khususnya di kawasan Asia Timur.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat mengenai Kepentingan Tiongkok dalam Perdamaian di Semenanjung Korea tahun 2017-2018 di atas, maka saran yang diberikan penulis adalah: prospek perdamaian di Semenanjung Korea harus terus dilakukan dengan cara membangun kembali rasa kepercayaan antarnegara, mempertahankan pertukaran bilateral, dan kerja sama di berbagai lapisan seperti kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, dan juga pada bidang yang berbeda (ekonomi, sosial, dan budaya dll). Hal tersebut dapat menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta stabil baik di Semenanjung Korea maupun di kawasan Asia Timur. Selain itu, dibutuhkan diplomasi publik bagi Tiongkok dalam menyelesaikan permasalahan Semenanjung Korea. Instrumen tersebut dapat berguna untuk memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Tiongkok ke arah positif dengan menggunakan manajemen geostrategis mengenai masa depan relasi Tiongkok dengan kedua-Korea.

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk melihat perkembangan kepentingan

Tiongkok pasca Deklarasi Panmunjom dan KTT Trump-Kim di Singapura khususnya bagi pemikir kebijakan luar negeri Tiongkok. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bahan pembelajaran mengenai kepentingan Tiongkok dalam menggambarkan situasi perdamaian di Semenanjung Korea mengingat pembelajaran ini penting untuk diketahui karena *national interest* sebuah negara akan dapat mempengaruhi kondisi sistem internasional saat ini baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral.

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti fenomena dengan tema yang sama, diharapkan dapat melakukan penelitian menggunakan konsep dan indikator berbeda seperti hegemoni, imperialisme Tiongkok, mediasi, negosiasi, dll. Hal ini diharapkan akan dapat memperkaya dan melengkapi tulisan-tulisan penelitian sebelumnya mengenai Kepentingan Tiongkok dalam Perdamaian di Semenanjung Korea.

Kebijakan Tiongkok terhadap Korut dan Korsel di masa depan akan terus berubah setiap waktu. Hal tersebut berkaitan dengan perubahan dalam strategi kebijakan luar negeri Tiongkok, lingkungan keamanan, ancaman bagi kepentingan keamanan, dan ekonomi di tingkat internasional saat ini. Pada abad ke 21, Tiongkok terus menyusun prioritas kebijakan di Semenanjung Korea dengan sangat hati-hati. Dalam waktu dekat, Tiongkok akan terus-menerus bersikeras melakukan denuklirisasi di Semenanjung Korea, mengelola, dan menormalkan hubungan dengan Korut sekaligus meningkatkan kemitraan strategis dengan Korsel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Berry, W. E. (2008). *Global Security Watch Korea*. London: Praeger Security International,.
- Bogdan, R., & Biklen, S. (1992). *Qualitative Research for Education*. Boston, MA: Allyn and Bacon.
- Buzan, Barry; Ole, Weiver. (2003). *Region and Power The Structure in International Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Buzan, B. (2014). An Introduction to the English School of International Relations: The Societal Approach. Dalam M. Dian, & S. Menegazzi, *New Regional Initiatives in China's Foreign Policy The Incoming Pluralism of Global Governance* (hal. 6). Switzerland: Palgrave Macmillan.
- Carr, E. (1939). *Twenty Years Crisis*. London: Macmillan.
- Creswell, J. W. (1998). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- . (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Galtung, J. (1995). *Violence, Peace, and Peace Research, Essays on Peace: Paradigms for Global Order*. Central Queensland University press.
- Galtung, J. a. (2007). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. London and New York: Routledge.
- Goldstein, J. S., & Pevehouse, J. C. (2010). *International Relations*. New York: Longman.
- Machiavelli, N. (2005). *The Prince*. Oxford: Oxford University Press.

- Mearsheimer, J. (1998). *The False Promise of International Institutions*. Dalam M.E. Brown, Owen R. Coates, Sean M. Lynn-Jones and Steven E. Millar, *Theories of War and Peace*. Cambridge: MIT Press.
- Mas'ood, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Morgenthau, H. J. (1968). *Politics Among Nations, 4th ed.* New York: McGraw Hill.
- Morgenthau, H. J., & Thompson, K. W. (1997). *Politics among nations: the struggle for power and peace sixth edition*. New York: McGraw-Hill.
- Noland, M. (2008). *Avoiding the Apocalypse*. Washington DC: Institute for International Economics.
- Richmond, O. P. (2008). *Peace in International Relations*. London and New York: Routledge.
- Rozman, G. (2012). *China's Korea Policy in the Making Who Make It, And How Is It Mad*. US: Palgrave Macmillan.
- S. Papp, Daniel. (1997). *Contemporary International Relations: Framework for Understanding*. United States of America: Allyn and Bacon, hal 442-443.
- Scobell, A. (2004). *China and North Korea: from Comrades-in-Arms to Allies at Arm's Length*. Ann Arbor: University of Michigan.
- Thomas, D., Ingvild, B., & Costa, A. F. (2011). *Key Concepts in International Relations*. New Yorks: SAGE Publications.
- Thucydides. (1970). *History of the Peloponnesian War, Book V*. London: Penguin.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: design and methods; Fifth edition*. United States of America: SAGE Publications, Inc.

Report/Working Paper:

- Andrew, S., & Mark, C. (2014). China's North Korea Policy: Rethink or Recharge? *Challenges for pasific command, Parameter 44 (1) Spring 2014*, 51-63.
- Brown, W. B. (2018). *Special Report North Korea's Shackled Economy*. Washington, DC: The National Committee on North Korea.
- Feng Zhu. (2011). Flawed Mediation and a Compelling Mission: Chinese Diplomacy in the Six-Party Talks to Denuclearise North Korea. *East Asia Journal Volume 28 issue 3*, 205.

- Isnaeni, N. A. (2017). Dampak program pengembangan nuklir Korut terhadap hubungan bilateralnya dengan Tiongkok tahun 2013-2015. *Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2017, Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/in>*, 48-55.
- Jongho Shin. (2018). China's Great Power Identity and Its Policy on the Korean Peninsula in the Xi Jinping Era. *Pacific Focus, Vol. XXXIII, No. 2* (August 2018), 288.
- Juyan Zhang, & Yi Han. (2013). Testing the rhetoric of China's soft power campaign: a case analysis of its strategic ambiguity in the Six Party Talks over North Korea's nuclear program. *Asian Journal of Communication, 23:2*, 203.
- Kim Heung Kyu. (2014). China's Position on Korean Unification and ROK-PRC Relations. *Journal Strategy Research Volume 61, Special Issue 2014. 02 Korea Institute for Strategic Studies*, 245-257.
- Masafumi Iida. (2019). Chapter 1: China's Foreign Strategy Causes Friction with the Existing World Order. *NIDS China Security Report 2019. China's Strategy for Reshaping the Asian Order and Its Ramifications*.
- Menegazzi, S. (2017). China's Foreign Policy in Northeast Asia: Implications for the Korean Peninsula. *IAI Working Papers 17\03 January 2017 ISSN 2280-4331 / ISBN 978-88-9368-021-9*.
- Morgenthau, H. J. (1952). Another Great Debate: The National Interest of United States. *American Political Science Review*, 961-998.
- Nuechterlein, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies, Vol 2* , 248.
- Pardo, R. P. (2012). China and Northeast Asia's Regional Security Architecture: The Six-Party Talks as a Case of Chinese Regime-Building?. *Journal of East Asia (2012) 29:337-354 DOI 10.1007/s12140-012-9181-4.*, 345.
- Shih Chih-yu, & Yin Jiwu. (2013). Between Core National Interest and a Harmonious World: Reconciling Self-role Conceptions in Chinese Foreign Policy. *The Chinese Journal of International Politics, Vol. 6, 2013, doi:10.1093/cjip/pos02*, 59-84.
- Shinji Yamaguchi. (2018). Chapter 3; Issue in China-US Relations in the East Asian Region. *NIDS China Security Report 2018. The China-US Relationship at a Crossroads*.
- Syahrin, M. N. (2018). Logika Dilema Keamanan Asia Timur dan Rasionalitas Pengembangan Senjata Nuklir Korut. *Intermestic: Journal of International Studies. Volume 2, No. 2*, 116-138.

Tianyi Wang. (2014). Small State, Big Influence: China's North Korea Policy Dilemma. *Georgetown Journal of Asian Affairs Fall/Winter 2014* by School of Foreign Policy Georgetown University.

Unification, K. I. (2011). *White Paper on Human Rights in North Korea*. Seoul: Korea Institute for National Unification.

Yea, S. (2017). Demystifying the Survival of North Korea. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 4(1). <https://doi.org/10.1177/2347797016689208>, 50–68.

Sumber Online:

Albert, E. (2018). *The China-North Korea Relationship*. Diambil kembali dari <https://www.cfr.org/background/china-north-korea-relationship>.

Bandow, D. (2018). *Work With China to Bring North Korea Into the International System*. Diambil kembali dari <https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/work-with-china-to-bring-north-korea-into-the-international-system>

———. (2018). *China's Role in Denuclearizing the Korean Peninsula*. Diambil kembali dari <https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/chinas-role-in-denuclearizing-the-korean-peninsula>

Bard, A. (2018). *The Pros and Cons of a Korean War Peace Treaty*. Diambil kembali dari [https://nationalinterest.org/feature/pros-and-cons-korean-war-peace-treaty-29322`](https://nationalinterest.org/feature/pros-and-cons-korean-war-peace-treaty-29322)

Belt and Road Initiative (BRI) diambil kembali dari <https://www.ebrd.com/what-we-do/belt-and-road/overview.html>

Chinese Cadre Learning Network. 2017, February 21. "Xi Jinping Mentions for the First Time the 'Two Guides' Principle Has Deep Meaning." Diambil kembali dari <http://www.ccln.gov.cn/hotnews/230779.shtml> (in Chinese).

Chi Dehua. (2018). *Chinese, South Korean and Japanese leaders to hold trilateral meeting*. Diambil kembali dari <https://gbtimes.com/chinese-south-korean-and-japanese-leaders-to-hold-trilateral-meeting>

China's Military Strategy. (2015). Diambil kembali dari Ministry of National Defense of the People's Republic of China : <http://eng.mod.gov.cn/Database/WhitePapers/2014.htm>.

Chinese National Security Decision-Making: Processes and Challenges. (2013). Diambil kembali dari Brookings: <http://www.brookings.edu/research/papers/2013/05/chinese-national-security-decision-making-sun>.

- Chinese Views and Commentary on the 'One Belt, One Road' Initiative*. (2015). Diambil kembali dari [http://www.hoover.org/research /chinese-views-and-commentary-one-belt-one-road](http://www.hoover.org/research/chinese-views-and-commentary-one-belt-one-road).
- Creating Together the Asia-Pacific Community of Solidarity and Common Destiny*. (2014). Diambil kembali dari Global Security.org: <https://www.globalsecurity.org/military/world/china/china-dream.html>
- Congressional Executive Commission on China (CECC)*. (2017). *North Korean Refugees in China ; Repatriaion of Refugees and Border Conditions*. Diambil kembali dari https://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/documents/AR17%20NKR_final.pdf
-
- _____ . (2018). *North Korea Refugees in China ; Repatriaion of Refugees and Border Conditions*. Diambil kembali dari https://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/documents/2018A_North%20Korean%20Refugees%20in%20China.pdf
- Davenport, K. (2018). *UN Security Council Resolutions on North Korea*. Diambil kembali dari <https://www.armscontrol.org/factsheets/UN-Security-Council-Resolutions-on-North-Korea>
- East Asia/Southeast:: China-The World Factbook*. (2018). Diambil kembali dari Central Intelligence Agency (CIA): <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html>
- Fan Gaoyue. (2018). *Resume Dialogue on Denuclearization*. Diambil kembali dari <https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/resume-dialogue-on-denuclearization>
- G. Kimball, D. (2018). *North-South Summit Eases Korean Tensions*. Diambil kembali dari <https://www.armscontrol.org/act/2018-10/news/north-south-summit-eases-korean-tensions>
- Import/Export By Country China CN*. (2018). Diambil kembali dari *Korean Customs Service (KCS)*. <http://www.customs.go.kr/kcshome/trade/TradeCountryView>
- IONP. (2011, April 08). *International Nonproliferation Organizations and Regimes Center for Nonproliferation Studies*. Diambil kembali dari Six Party Talks- Nuclear Threat Initiative: <http://www.nti.org>
- Javad Heydarian, R. (2018). *Why North Korea's Change of Heart on Peace Negotiations?* Diambil kembali dari <https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/why-north-koreas-change-of-heart-on-peace-negotiations>

- Johnson, J., & Kikuchi, D. (2018, Mei 28). *With Historic Meeting of Leaders, North Korea and China Shore Up Leverage as Kim-Trump Talks Loom* . Diambil kembali dari The Japan Times:
<https://www.japantimes.co.jp/news/2018/03/28/asia-pacific/historic-meeting-leaders-north-korea-china-shore-leverage-kim-trump-talks-loom/#.WwYdeTjLJqx>
- Julio, E. (2016). *Hubungan Merenggang, Pejabat Tinggi Korut Tetap Kunjungi China*. Diambil kembali dari
<https://news.okezone.com/read/2016/06/01/18/1403337/hubungan-meregang-pejabat-tinggi-korut-tetap-kunjungi-china>
- K Armstrong, C. (2018). *Trump Kim Summit Singapore too Early Call Success*. Diambil kembali dari
<https://www.channelnewsasia.com/news/commentary/trump-kim-summit-singapore-too-early-to-call-success-10564536>
- New Asian security concept for new progress in security cooperation*. (t.thn.). Diambil kembali dari Foreign Minister People's of Republic China:
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/yzxhxzyxrshydsfch/t1159951.shtml.
- North Korea's other top trading partners*. (2017). Diambil kembali dari The Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA):
<https://www.northkoreaintheworld.org/china-dprk/total-trade>
- New Northern Policy seeks to contribute to peace on Korean Peninsula*. Diambil kembali dari <https://en.yna.co.kr>
- Petrushka, J. (2018). *Across the Yalu River: the past, and future, of China-North Korea relations*. Diambil kembali dari
<https://www.nknews.org/pro/across-the-yalu-river-the-past-and-future-of-china-north-korea-relations/>
- President Xi Jinping Delivers an Important Speech in ROK's Seoul National University*. (2014). Diambil kembali dari China's Ministry of Foreign Affairs:
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/xjpzxdhgjxgsfw/t1172436.shtml
- Resolution 2371 Non-Proliferation/Democratic People's Republic of Korea*. (2017). Diambil kembali dari UNSCR:
<https://unscr.com/en/resolution/2371>
- Resolution 2375 Non-Proliferation/Democratic People's Republic of Korea*. (2017). Diambil kembali dari UNSCR:
<https://unscr.com/en/resolution/2375>

- Roberts, P. (2017). *China's Refusal of North Korean Defectors Is Enabling A Growling Human Rights Crisis*. Diambil kembali dari <https://psmag.com/news/chinas-refusal-of-north-korean-defectors>
- Snyder, S dan Byun, S. (2018). *China's Multiple Roles in the Korean Drama*. Diambil kembali dari <http://cc.pacforum.org/2018/09/chinas-multiples-roles-in-the-korean-drama/>
- Szczudlik, J. (2017). *China's Position on the North Korea Crisis,* "PISM Bulletin, no. 118 (1058). Diambil kembali dari <https://www.pism.pl/publications/bulletin/no-3-1074>
- Szczudlik, J. (2017). *Threats to Security in East Asia* PISM Bulletin, no. 28 (968). Diambil kembali dari PISM: <https://www.pism.pl/publications/bulletin/no-3-1074>
- Teon, A. (2018). *China Wants To Extend "One Belt, One Road Initiative" To The Korean Peninsula*. Diambil kembali dari <https://china-journal.org/2018/09/27/china-wants-to-extend-one-belt-one-road-initiative-to-the-korea-peninsula/>
- The Chinese Chinese Dream and Xi Jinping's Power Politics*. (2017). Diambil kembali dari <https://dw.com/en/the-chinese-dream-and-xi-jinpings-power-politics/a-41941966>.
- The National Committee on North Korea (NCNK)*. (2017). *North Korea's other top trading partners*. Diambil kembali dari <https://www.northkoreaintheworld.org/china-dprk/total-trade>
- The Shodhganga Infilibnet Centre*. (2014). *Chapter two concept of peace*. Diambil kembali dari Shodhganga infilibnet: <http://shodhganga.infilibnet.ac.in/bitstream/10603/36399/7/chapter%202.pdf>
- Toloraya, G. (2018). *Designing A New Peace and Security System in Korea*. Diambil kembali dari <https://www.38north.org/2018/09/gtoloraya090718/>
- Trade (% GDP). The World Bank. (2018). Diambil kembali dari <https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?locations=CH>
- Trading Economics. *China GDP Annual Growth Rate*. (2019). <http://tradingeconomics.com/china/gdp-growth-annual>
- Treaty of Friendship, Co-operation and Mutual Assistance between the People's Republic of China and the Democratic People's Republic of Korea*]. (2000). Diambil kembali dari NPC: http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/25/content_781.htm

- Wang Yi. (2017). *A New Era of China's Foreign Policy*. Diambil kembali dari <https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/chinas-diplomacy-breaking-new-ground>
- . (2014). *Peaceful Development and the Chinese Dream of National Rejuvenation*. Diambil kembali dari <https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/chinas-diplomacy-breaking-new-ground>
- Weida Li. (2018). *China's Xi urges US-North Korea talks and peninsula denuclearisation*. Diambil kembali dari <https://gbtimes.com/chinas-xi-urges-us-north-korea-talks-and-peninsula-denuclearisation>
- William. (2018). *How sustainable is the China-South Korean thaw?* Diambil kembali dari <http://www.atimes.com/article/how-sustainable-is-the-china-south-korean-thaw/>
- Williams, J. (2018). *Trump-Kim Document Agreement Full Text Denuclearuzation*. Diambil kembali dari <https://www.vox.com/2018/6/12/17452532/trump-kim-document-agreement-full-text-denuclearization-read>
- World Development Indicators database, World Bank*, 21 September 2018. Diambil kembali dari <http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators>
- XI Jin Ping- China Dream*. (2018). Diambil kembali dari Global Security.org: <https://www.globalsecurity.org/military/world/china/forrel.htm>
- Xi Jinping Mentions for the First Time the 'Two Guides' Principle Has Deep Meaning*. (2017). Diambil kembali dari Chinese Cadre Learning Network: <http://www.ccln.gov.cn/hotnews/230779.shtml>
- Xi Jinping's Report at 19th CPC National Congress*. (2017). Diambil kembali dari Xinhuanet: http://news.xinhuanet.com/english/special/2017-11/03/c_136725942.htm